

**SEJARAH PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME
MORO NATIONAL LIBERATION FRONT (MNLF) DI FILIPINA
SELATAN (1972-1996 M)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)**

oleh

MAHMUD MAULANA

NIM. 2017503010

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Mahmud Maulana

NIM : 2017503010

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme Moro National Liberation Front (MNLF) di Filipina Selatan (1972-1996 M)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Mahmud Maulana

2017503010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan (1972-1996 M)

Yang disusun oleh (Mahmud Maulana 2017503010) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Hj. Ida Noviyanti, M.Ag
NIP. 19711104200001121002

Penguji II

Sidik Fauji, M.Hum
NIP. 199201242018011002

Ketua Sidang/Pembimbing

Fitri Sari Setyorini, M.Hum
NIP. 198907032023212036

Purwokerto, 30 Agustus 2024

Dekan FUAH



Dr. Hartono, M.Si
NIP. 197205012005011004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Mahmud Maulana

Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini peneliti sampaikan bahwa:

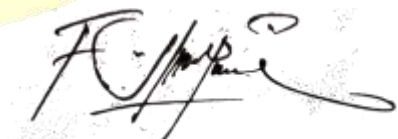
Nama : Mahmud Maulana
NIM : 2017503010
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul : Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan (1972-1996 M)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum).

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu peneliti mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing,



Fitri Sari Setyorini, M.Hum.
NIP. 19890703 202321 2 036

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)



**SEJARAH PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME
MORO NATIONAL LIBERATION FRONT (MNLF) DI FILIPINA
SELATAN (1972-1996 M)**

Mahmud Maulana

NIM. 2017503010

Prodi Sejarah Peradaban Islam

Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62 281) 635624 Purwokerto 53126

Email: maulanna201@gmail.com

Abstrak

Gerakan separatis MNLF telah berdampak secara signifikan terhadap kehidupan bangsamoro. Meskipun mencapai perdamaian yang diinginkan oleh umat Islam di Filipina merupakan hal yang menantang atau sangat sulit terealisasi, namun kemajuan secara bertahap sedang dibuat. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya MNLF dalam mengadvokasi Muslim Moro di Filipina Selatan, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau yang sering disebut dengan istilah metodologi penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Gerakan Separatisme *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Latar belakang dari ketidakpuasan etnis Moro terhadap kebijakan pemerintah Filipina yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. *Kedua*, MNLF telah mengalami berbagai tahap perkembangan, mulai dari perjuangan bersenjata, perpecahan internal, hingga keterlibatan dalam proses perdamaian. Perkembangan MNLF mencerminkan dinamika perjuangan panjang masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan. *Ketiga*, MNLF dalam memperjuangkan minoritas menuju perdamaian adalah bahwa gerakan MNLF berhasil mencapai beberapa perjanjian damai, seperti perjanjian Tripoli (1976) dan perjanjian damai (1996). Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori gerakan sosial Sydney Tarrow.

Kata Kunci: MNLF, Separatisme, Filipina Selatan.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF *MORO NATIONAL LIBERATION FRONT* (MNLF) SEPARATISM MOVEMENT IN THE SOUTHERN PHILIPPINES (1972-1996 M)

Mahmud Maulana
NIM. 2017503010

Study Program of History Islamic Civilization
Department of Qur'anic Studies and History
Faculty of Ushuluddin Adab and Humanities
State Islamic University Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62 281) 635624 Purwokerto 53126
Email: maulanna201@gmail.com

Abstract

The MNLF separatist movement has significantly impacted the lives of the bangsamoro. Although achieving the peace desired by Muslims in the Philippines is challenging or very difficult to realize, progress is gradually being made. This thesis aims to explain how the MNLF's efforts in advocating for moro Muslims in the Southern Philippines, and analyze the factors that influence its struggle. This research uses a library research approach. The steps used in this research include: Heuristics, verification, interpretation, and historiography or what is often referred to as historical research methodology. The results of this study show that: First, the Moro National Liberation Front (MNLF) Separatist Movement was motivated by ethnic Moro dissatisfaction with Philippine government policies that were considered unfair and discriminatory. Second, the MNLF has experienced various stages of development, ranging from armed struggle, internal divisions, to involvement in the peace process. The development of the MNLF reflects the dynamics of the long struggle of the Moro Muslim community in the Southern Philippines. Third, the MNLF in fighting for minorities towards peace is that the MNLF movement succeeded in reaching several peace agreements, such as the Tripoli agreement (1976) and the peace agreement (1996). The theoretical basis used in this research is based on Sydney Tarrow's social movement theory.

Keywords: MNLF, Separatism, Shoutern Philippines.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar pustaka Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain'.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1). Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasroh	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2). Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هُؤُلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fath}ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- 2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضه الأطفال

Raudah al Atfāl

المدينة المنوره

Al Madīnah al Munawwarah

طلحه

Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan

dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajul

القلم - al-qalam

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

أبو بكر : Abu Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk al-asma' al-khamsah dan yang semacamnya ditulis "i".

Contoh:

البخاري : al-Bukhari

أبي : Abi

في : Fi

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - bismillahi majreha wa mursaha

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translitrasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dalam penulisan penelitian ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti mendedikasinya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Tatang Suryadi dan Ibu Roroh Sakiroh tercinta, yang selalu memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang yang tidak tergoyahkan, dan inspirasi sejak peneliti lahir hingga saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Adik peneliti, Ainun Hisna Fadhilah yang sangat saya cintai, serta senantiasa memberi dukungan semangat setiap langkah yang peneliti ambil.
3. Guru-guru peneliti, Eyang Kiai Kosimin beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatussolihin Babakan, Karangpucung. dan Uwa K.H. Ihsannudin Riskam, M. Pd. beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ihsan Al-Banjary Kota Banjar. Almaghfurlah Abah Dr. K. H. Chariri Shofa M.Ag., beserta istri beliau Dra Ny. Hj. Ummi Afifah Chariri M.S.I., dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Serta, Gus Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S, M. Pd, beserta keluarga.
4. Dosen Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, dan dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam, baik guru formal ataupun non formal yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan akademik mahasiswa.
5. Teman-teman Sejarah Peradaban Islam angkatan 2020, Squad MLBB Eclipse NoMercy, sahabat-sahabati PMII Rayon FUAH, yang senantiasa memberikan dukungan serta berjuang bersama hingga saat ini.
6. Sebagai penutup, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada almamater Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan para cendekiawan di bidang sejarah, dengan fokus pada daerah-daerah Muslim yang menjadi minoritas.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kesempatan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan diberi kemudahan dalam menuliskan skripsi dengan judul **“Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme Moro National Liberation Front (MNLF) di Filipina Selatan (1971-1996 M)”** dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Aamiin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang didedikasikan untuk Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum).

Skripsi yang berfokus pada minoritas Muslim di wilayah Moro Filipina Selatan ini telah menarik perhatian para peneliti yang tertarik untuk memahami perjuangan historis sesama pemeluk agama dalam mengamankan hak-hak sosial mereka di masa lampau. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dengan bantuan yang cukup besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hartono, M.Si. selaku Dekan, Prof. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag. M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Dr. Farichatul Maftuhah, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, Dr. Elya Munfarida, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Nurrohim Lc., M.Hum., selaku koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

4. Fitri Sari Setyorini, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang baik dan teliti dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsinya.
5. Seluruh dosen SPI, dosen FUAH serta seluruh dosen UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Kedua orang tua saya Bapak Tatang Suryadi dan Ibu Roroh Sakiroh. Terimakasih atas segala doa dan pengorbanan dan kasih sayang, dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa sampai pada tahap akhir dan bisa memperoleh S-1 nya.
7. Adik saya Ainun Hisna Fadillah yang telah memberikan motivasi, semangat dalam penulisan skripsi ini. Untukmu raihlah cita-citamu setinggi-tingginya.
8. Kakek dan Nenek saya Tarsuni, Alm., Surtini, Mbah Kholid dan Muad'ah terimakasih atas dukungan dan doanya.
9. Segenap keluarga besar dari Ayah dan Ibu saya terimakasih atas dorongan semangat yang telah diberikan kepada saya.
10. Kepada Team Kateo (Kebanyakan Teori) seperjuangan Afif Muhammad Abdillah, Leni Agustina, Arkan Nur Ramadhan. Terimakasih senantiasa menjadi tempat canda tawa, dan bertukar pikiran.
11. Kepada teman-teman PMII Rayon Fuah, HMPS SPI 2021/2022 dan teman-teman pengurus DEMA FUAH 2023. Terimakasih atas pengalaman dan pelajarannya.
12. Kepada Squad MLBB Eclipse NoMercy Farros Iqbal Raihan, Ragha Sathtriea Shihab, Firman Adiyatsi, Afif Muhammad Abdillah, Aidina Ainul Izzi, Gilang Sadewa, Wafiq Khoer, M. Akmal Syifa. Terimakasih atas dukungannya.
13. Terima kasih buat pemilik nama Risa Naelatus Syifa, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat peneliti, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.

14. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini. Meskipun tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih sepenuhnya, melainkan do'a sebagai perbuatan baik. Peneliti percaya bahwa Allah SWT akan menerima dan meridho'i doa-doa ini sebagai amal baik. Jazakumullah khairan katsiran.

Purwokerto, 15 Mei 2024

Peneliti,



Mahmud Maulana

NIM. 2017503010



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LAHIRNYA GERAKAN SEPARATISME <i>MORO NATIONAL LIBERATION FRONT</i>.....	22
A. Kehidupan Nur Misuari	22

1. Profil Nur Misuari.....	22
2. Nur Misuari Masuk Dunia Politik	23
B. Latar Belakang Lahirnya Gerakan Separatisme Moro National Liberation Front	24
C. Faktor-Faktor Pendukung Lahirnya Moro National Liberation Front.....	38
D. Respon Muslim Moro dan Negara-Negara Islam Terhadap Lahirnya Gerakan Separatisme Moro National Liberation Front.....	42
BAB III PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME MORO NATIONAL LIBERATION FRONT.....	45
A. Sejarah Organisasi Moro National Liberation Front.....	45
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gerakan Separatisme	49
1. Politik Integrasi Kolonial	50
2. Diskriminasi Terhadap Identitas Sosial dan Budaya.....	55
3. Distribusi Sumber Daya di Mindanao	58
4. Pembersihan Etnis terhadap Bangsamoro	61
BAB IV GERAKAN SEPARATIS MORO NATIONAL LIBERATION FRONT DALAM MEMPERJUANGKAN MINORITAS MUSLIM MORO MENUJU PERDAMAIAN.....	64
A. Potret Muslim moro	64
1. Perjuangan Bersenjata MNLF	67
2. Perjuangan Politik	70
B. Upaya Dalam Menuju Perdamaian	72
C. Perjanjian Tripoli 1976	80
D. Perjanjian Damai (Peace Agreement) 1996	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

ARMM	: Autonomous Region of Muslim Mindanao.
BAF	: Bangsamoro Armed Force.
BMA	: Bangsa Moro Army.
FLN	: The National Liberation Front.
MIM	: Muslim Independent Movement/ Gerakan Kemerdekaan Muslim.
MILF	: Moro Islamic Liberation Front.
MLF	: Moro Liberation Front.
MNLF	: Moro National Liberation Front.
PUIC	: Parliamantary Union of Islamic Country.
OIC	: Organization Islamic Cooperation.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Gambar
- a. Gambar 1: Peta Filipina
 - b. Gambar 2: Prof. Dr. Nurullaji Pining Misuari
 - c. Gambar 3: Bendera National Moro Liberation Front (MNLF)
 - d. Gambar 4: Prof. Dr. Caesar Adib Majul
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 5 : Blangko Bimbingan
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 7 : Sertifikat
- a. Sertifikat BTA-PPI
 - b. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
 - c. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
 - d. Sertifikat PPL
 - e. Sertifikat KKN
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Filipina telah berperang dengan pemberontak Muslim di Filipina selatan sejak tahun 1972. Pertempuran di Filipina menjadi penting karena menghabiskan korban jiwa dan sumber daya, dan berpotensi menggoyahkan rezim darurat militer Presiden Ferdinand Marcos. Hal ini memiliki dampak yang signifikan di luar Filipina karena telah mempengaruhi hubungan Filipina dengan negara-negara lain, termasuk Sekretariat Islam ASEAN dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selain itu, faktor-faktor etnis, filosofis, dan ekonomi telah menentukan kemungkinan bahwa peperangan jenis ini akan berlanjut di Asia Tenggara. Front Pembebasan Nasional Moro adalah kelompok Muslim yang bertanggung jawab atas perjuangan ini di Filipina. Asal usul Front, struktur, tujuan, sumber daya, dan taktik ini menunjukkan mengapa pertempuran telah mencapai puncaknya; alasan mengapa perang tampak "tidak ada habisnya", seperti yang digambarkan dalam artikel New York Times; dan dampak pertempuran terhadap Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya (Noble, 1976: 405).

Nur Misuari merupakan seorang ahli politikus yang penting di Filipina serta memegang jabatan sebagai pemimpin Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro. Bernama asli Nurullaji Pining Misuari tetapi lebih

dikenali dengan panggilan Nur Misuari. Nur Misuari lahir pada tanggal 3 Maret pada tahun 1939, dan tinggal di Kabingaan, yang terletak di Pulau Tapul, kepulauan Sulu, Filipina. Nur Misuari, yang lahir dari keluarga yang terdiri dari sepuluh bersaudara, yang merupakan anak keempat. Ibu bapaknya keturunan Sulu dan kedua orangtuanya Saliddain Misuari dan Dindanghail Pining yang tinggal di Kabingaan di Pulau Tapul. Saliddin bekerja mencari nafkah sebagai nelayan, sementara Dindanghail Pining bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sejak era Kesultanan Suluk, Komunitas Sulu atau Tausug telah tinggal di Kepulauan Sulu dan Kalimantan (Sabah). Bahasa lisan utama mereka adalah Tausug atau Sug, dan mereka menganut Islam sebagai agama resmi. Mereka sekeluarga berpindah dari Pulau Tapul ke Jolo, ketika Nur Misuari masih kecil (Zain, 2019: 198)

Nur Misuari mendapat pendidikan awal di sekolah *Elementary Jolo Central* dari tahun 1949 sehingga 1955 dan menyambung pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sulu pada tahun 1955 hingga 1958. Karena disebabkan dengan keadaan pendapatan keluarga Nur Misuari tidak mencukupi, bapaknya tidak mampu untuk menghantar dia ke universiti. Selepas mencapai ijazah sarjana muda dalam bidang sains politik di Universitas Filipina pada tahun 1962, kemudian ia melanjutkan pendidikan dalam bidang undang-undang tetapi hanya sementara saja. Hal ini karena mentornya, Dr. Caesar Adib Majul ketika itu menyarankan Nur Misuari untuk meneruskan dalam bidang sains politik. Setelah

menamatkan ijazah sarjana pada tahun 1964 di Pusat Asia Universiti Filipina, Diliman, Nur Misuari telah menubuhkan sebuah persatuan mahasiswa radikal yang disebut Bagong Asya (*New Asia*) (Zain, 2019: 199).

Pada tahun 1968, terjadi sebuah peristiwa penting bagi umat Muslim di Filipina selatan ketika sejumlah pemuda Muslim kehilangan nyawa mereka di Pulau Corregidor, menandai sebuah moment penting yang disebut sebagai Tragedi Jabidah. Peristiwa menyedihkan yang merenggut banyak nyawa dari masyarakat Muslim Moro ini mendorong pemimpin Muslim Filipina Nur Misuari, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendirikan organisasi *Moro National Liberation Front* (MNLF) pada tahun 1972. Aktivisme Nur Misuari dipicu oleh keterlibatannya dalam aksi protes setelah tragedi Jabidah di pulau Corregidor, di mana ia menyaksikan tindakan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina (Chaidar, 1999: 39).

MNLF yang didirikan oleh Nur Misuari pada 21 Oktober 1972. Munculnya dari pengamatan Nur pada tahun 1969 terhadap tantangan yang dihadapi bangsa Muslim Moro, yang ditandai dengan sengketa tanah dan marjinalisasi Muslim di Filipina. Hal ini memicu gesekan politik antara pemerintah Filipina dan faksi-faksi pemberontak Muslim Moro, yang kemudian memicu Konflik Moro. Tragisnya, konflik ini memuncak dengan pembantaian besar-besaran yang merenggut nyawa 60 pemimpin Muslim Filipina yang berusaha menegaskan klaim teritorial

atas wilayah bagian timur negara bagian Sabah, Malaysia. Nur Misuari memang mendirikan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) untuk memperjuangkan pendirian negara Islam di Filipina, khususnya di wilayah mayoritas Muslim di Mindanao. Ideologi MNLF, seperti yang disebutkan, berakar pada egalitarianisme, yang mengadvokasi kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk agama, politik, ekonomi, dan sosial.

Pada tahun 1992, sebuah perjanjian sementara memang dibentuk, menandai perkembangan signifikan dalam konflik antara MNLF dan pemerintah Filipina. Perjanjian ini membuka jalan bagi negosiasi dan diskusi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama dan mengatasi keluhan komunitas Muslim di Mindanao. Setelah itu, sebuah perjanjian sementara dibuat tahun 1992. Selanjutnya, pada tahun 1996, perjanjian Damai Jakara disahkan oleh MNLF. Fakta ini mengadvokasi pembentukan Daerah Otonomi Muslim Mindanao, yang memberikan otonomi kepada penduduk yang mayoritas beragama Islam dalam pemerintahan. Nur Misuari mengambil peran sebagai Gubernur di wilayah tersebut. Namun demikian, masa jabatannya hanya sebentar, berakhir ketika ia menggugat otoritas pemerintah Filipina pada November 2001 tanpa hasil. (Adryamarthanino, 2021).

Pada tahun 1996 terjadi pergeseran signifikan yang memajukan komunitas Muslim di Filipina, kepresidenan beralih dari Ferdinand Marcos ke Corazon Aquino. Perubahan ini diantisipasi untuk mendorong perdamaian di Filipina Selatan. Memang, di bawah pemerintahan Aquino,

pemerintah lebih memilih kebijakan yang akomodatif terhadap kelompok-kelompok perlawanan di Mindanao daripada kebijakan yang refresif. Pilihan kebijakan ini dipengaruhi oleh iklim politik di Filipina dan dukungan Internasional untuk menyelesaikan konflik Mindanao (Firmanzah, 2017: 44).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan sumber lain yang relevan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji perkembangan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih banyak pemahaman yang secara mendalam mengenai permasalahan yang sudah diuraikan di atas dengan judul penelitian, **“Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan (1972-1996 M)”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Secara umum penelitian ini dibatasi dari tahun 1972 sampai 1996. Tahun 1972 didirikannya MNLF sebuah organisasi ketentaraan dan politik yang didirikan oleh Nur Misuari. Pada tahun 1996, MNLF menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Filipina, mewakili kelompok pemberontak Muslim Moro.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan?
2. Bagaimana sejarah perkembangan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front*?
3. Bagaimana Gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* dalam memperjuangkan Minoritas Muslim Moro menuju perdamaian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berjudul “Gerakan Separatis *Moro National Liberation Front (MNLF)* di Filipina (1972-1996)” adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan.
2. Untuk menggambarkan sejarah perkembangan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front*.
3. Untuk menggambarkan Gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* dalam memperjuangkan Minoritas Muslim Moro menuju perdamaian.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan sejarah perkembangan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan.

b) Sebagai referensi terhadap penelitian yang berkaitan dengan wilayah minoritas muslim, khususnya Filipina Selatan.

2. Secara Praktis

a) Sebagai bahan kajian ilmiah untuk prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI), khususnya sejarah peradaban Islam kawasan minoritas Muslim.

b) Penelitian ini digunakan sebagai bahan studi banding bagi peneliti lain di bidang kajian yang sama dan memberikan referensi berkaitan dengan minoritas muslim di Filipina.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini peneliti akan mengemukakan mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan sejarah Islam di Filipina. Penelitian ini berguna untuk membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini. Adapun buku, jurnal, dan artikel sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Eva Putriya Hasanah berjudul “Studi Eksplanatif Penyebab Gerakan Separatis Minoritas Muslim Moro di Filipina” dalam *Journal of Integrative International Relations* ISN 2477-3557. Volume 3 Nomer 2, November 2017. Jurnal ini mengkaji tentang studi eksplanatif gerakan separatis minoritas Muslim di Filipina yang difokuskan terhadap penyebabnya gerakan separatis itu sendiri. Adapun perbedaannya dengan penelitian ialah fokus terhadap kajiannya. Dalam

penelitian ini difokuskan kepada suatu upaya (gerakan) *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Abd. Ghofur berjudul “Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Separatis Abu Sayyaf” dalam Jurnal Ilmiah Sosial Budaya Volume 13 Nomor 2, Juni 2016. Jurnal ini membahas mengenai masyarakat muslim yang ada di Filipina Selatan dan pergerakannya Abu Sayyaf. Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus kajiannya. Dalam penelitian ini difokuskan pada gerakan separatis *Moro National Liberation Front*.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Khairu Roojiqien Sobandi berjudul “Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas” dalam Jurnal Kajian Wilayah Vol. 2, No. 1, 2011, Hal. 35-55. Jurnal ini membahas mengenai separatisme di Asia Tenggara. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada gerakan separatis *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan. dan tidak melebar pada kajian gerakan separatis di Asia Tenggara.

Keempat, Buku (1999) Al Chaidar, dalam bukunya yang berjudul yang berjudul *Wacana Ideologi Negara Islam Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*. Buku ini membahas tentang analisis komparatif separatis di Asia Tenggara, khususnya berfokus pada Darul Islam di Indonesia dengan MNLF di Filipina. Asal-usul MNLF, termasuk para pendirinya, dan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada

pembentukannya, terutama pembantaian Jabidah pada tahun 1968. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada gerakan separatis *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan.

Kelima, Tesis (2016) Muhammad Dian Supyan, yang berjudul “Gerakan Darul Islam (DI) S.M. Kartosuwirjo Di Jawa Barat dalam Mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) (1945-1962 M)” Thesis ini membahas mengenai darul islam yang ingin mewujudkan negara Islam di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang dan fokus kajiannya. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada gerakan separatis *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan, dan tidak membahas gerakan darul islam yang dilakukan oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat.

Keenam, Skripsi (2011) Firmansyah, yang berjudul “Gerakan Separatisme Terhadap Negara yang sah dan Aspek Pidannya menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus GAM). Skripsi ini membahas mengenai gerakan separatisme di Aceh dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Karena adanya ideologi yang berbeda dan kekejaman penguasa serta tekanan atau tuntutan ekonomi. Adapun perbedaannya dengan penelitian ialah fokus terhadap kajiannya. Dalam penelitian ini di fokuskan kepada suatu upaya (gerakan) *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan. Dan tidak melebar pada kajian gerakan separatisme Aceh merdeka.

Secara keseluruhan, penelitian ini membahas pada kajian Sejarah perkembangan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan, walaupun pada perkembangannya mengalami pergeseran menjadi nasionalis yang berjuang membela Bangsamoro dalam menuntut hak mendirikan sebuah Negara otonomi penuh di wilayah Filipina Selatan. Juga sebagai pembeda dengan penelitian lain yang telah disebutkan di atas. Fokus dari penelitian ini secara khusus menyelidiki individu atau kelompok Muslim dari Filipina Selatan yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak minoritas Muslim Moro. Ruang lingkup penelitian ini terutama dibatasi pada periode antara tahun 1972-1996.

E. Landasan Teori

1. Teori Gerakan Sosial

Teori yang digunakan yaitu teori gerakan sosial dan pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Gerakan sosial menunjukkan upaya kolektif oleh suatu kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk melawan atau mengadvokasi transformasi (Jamil, 2013: 132). Sydney Tarrow mencirikan gerakan sosial sebagai upaya terpadu yang mengejar tujuan bersama dan memupuk kehesi sosial, yang secara terus-menerus terlibat dengan mereka yang berkuasa, lawan, dan otoritas yang mapan (Suharko, 2006: 3). Oleh karena itu, sebuah gerakan sosial dapat dicirikan oleh upaya kolektif dari sebuah kelompok atau masyarakat untuk melawan otoritas yang berkuasa.

Menurut Mc. Adam dan rekan-rekannya menyatakan bahwa gerakan sosial muncul sebagai hasil dari tiga faktor: kesempatan politik (*political opportunities*), struktur organisasi (*mobilization structures*), dan proses pbingkaian (*framing processes*) (Hidayat, 2012: 120). Political Opportunity muncul sebagai akibat dari kondisi kerangka politik, yang dalam hal ini sangat mempengaruhi kemajuan dan evolusi gerakan sosial (Hidayat, 2012: 120). Sejalan dengan latar belakang sejarah yang memunculkan gerakan separatisme Nur Misuari, yang berasal dari iklim politik pasca kemerdekaan Filipina, terutama setelah Perjanjian Perdamaian (Peace Agreement) yang berhasil yang mengarah pada pembentukan Daerah Otonomi Muslim Mindanao. Di tengah situasi politik yang memburuk, kepemimpinan Nur Misuari dan semangat kehesif di antara para pengikutnya, yang didorong oleh semangat religius, memuncak dalam mengejar hak-hak Muslim dan upaya untuk memperjuangkan kehadiran Islam di Filipina.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan Multidimensional. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi masalah ini dari berbagai perspektif sejarah, yang mencakup dimensi sosial, agama dan politik. (Miftahudin, 2020: 26). Berbagai metode digunakan, mencakup dimensi sosial, agama, dan politik. Sepanjang sejarah, pendekatan sosial telah

digunakan secara konsisten untuk meneliti dinamika masyarakat dan bagaimana perilaku manusia berubah (Miftahudin, 2020: 42). Pendekatan sosial menerangi pengalaman komunitas Muslim Moro di tengah-tengah penjajahan, sementara perspektif historis religius menggali sumber dan jejak praktik-praktik keagamaan, mengungkapkan interaksi yang rumit antara agama dan masyarakat (Dudung, 2011: 23).

Pendekatan keagamaan digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah Filipina berinteraksi dengan masyarakat Muslim Moro terkait Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan.

Pendekatan politik dalam analisis sejarah sebagai jalan yang unik untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah (Mifathun, 2020: 46). Dengan pendekatan politik khusus ini menawarkan wawasan tentang asal mula lahirnya gerakan separatisme *Moro National Liberation Front*. Dengan demikian, faktor ini memperpanjang gerakan Separatisme Nur Misuari, dan membuatnya tetap aktif hingga tahun 1996. Langkah-langkah pemerintah Filipina tersebut memunculkan tindakan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front*, yang berujung pada kesenjangan ekonomi dan alokasi sumber daya yang tidak merata antara komunitas Bangsamoro dan Filipina, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pembersihan etnis (Etnis Cleanshing).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) secara keseluruhan, dengan menggunakan metode penelitian historis (sejarah) dalam prosesnya. Metodologi penelitian sejarah adalah sebuah proses yang digunakan untuk memahami bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Metodologi sejarah sebagai *science of methods* berarti, sebagai sebuah ilmu tentang metode. Metodologi sejarah berfokus pada teknik-teknik untuk mengungkap dan memahami peristiwa-peristiwa masa lalu (sejarah). Dengan adanya metode sejarah agar bisa dipertanggungjawabkan dan terlacak kebenarannya. Konsep yang diuraikan untuk memastikan konsep tersebut supaya runtut dan terintegrasi, sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif atau utuh. Hal ini dimulai dengan mendefinisikan heuristik, menguraikan prasyarat untuk heuristik yang efektif, merinci langkah-langkah yang terlibat, dan mendiskusikan penerapannya dalam metode sejarah. Sumber-sumber yang digunakan meliputi berbagai buku tentang metodologi sejarah, metode sejarah, dan artikel jurnal, baik yang berbasis penelitian maupun konseptual, yang diakhiri dengan kesimpulan.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik meliputi kegiatan mengumpulkan dan mencari data yang relevan dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 2018: 73). Tahap ini mengharuskan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data yang

berkaitan dengan sejarah perkembangan gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina. Sumber-sumber referensinya tersebut meliputi karya tulis, seperti arsip web yang berkaitan langsung dengan penelitian, dan literatur-literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Data yang diambil dari Web arsip berisi tentang *Moro National Liberation Front* yang diterbitkan di Filipina. Arsip ini, secara khusus mengkaji tentang MNLF.

Sumber-sumber yang dirujuk meliputi karya-karya tertulis, seperti:

a) Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Buku “Dinamika Islam Filipina” karya Caesar Adib Majul.

Buku otobiografi yang komprehensif ini memberikan catatan sejarah yang rinci, karena Majul merupakan saksi hidup dari gerakan separatis Nur Misuari (*Moro National Liberation Front*) di Filipina Selatan. Sumber-

sumber ini memungkinkan para peneliti untuk menggambarkan gerakan separatisme Moro National

Liberation Front yang dipimpin oleh Nur Misuari di Filipina Selatan.

b) Sumber Sekunder

Dalam hal masalah sumber primer atau utama, maka sumber sekunder digunakan sebagai pendukung untuk penelitian ini. Sumber-sumber untuk penelitian ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur sekunder meliputi buku-buku seperti “*Tom Stern Nur Misuari An Authorized Biography*”, karya Thomas M. Mckenna *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*, dan lainnya. Jurnal-jurnal yang digunakan antara lain adalah artikel-artikel seperti “*Multikulturalisme, Separatisme, dan pembentukan negara bangsa di Filipina*,” karya Erna Budiwanti. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada artikel-artikel yang valid dari sumber-sumber seperti *mnlfn.net.com*, *Britannica*, *Bangsamoro.gov.ph*, dan artikel-artikel yang relevan dari situs-situs web seperti *Library of Congress online* serta *Bangsamoro.gov.ph*. Menurut Kuntowijoyo, sejarawan tidak perlu mengkhawatirkan apakah sebuah sumber atau data sejarah itu primer atau sekunder jika hanya ada satu sumber yang tersedia (Kuntowijoyo: 2005).

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah pengumpulan sumber-sumber sejarah di berbagai kategori, langkah selanjutnya adalah verifikasi, umumnya dikenal sebagai kritik, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan sumber-sumber tersebut. Proses ini meliputi pengujian keaslian sumber, yang dilakukan melalui kritik eskternal, dan menilai kredibilitas sumber melalui kritik internal (Abdurrahman, 2019: 108).

a) Kritik Ekstren

Peneliti menggunakan Kritik Ekstern untuk menilai keaslian sumber yang digunakan. Hal ini melibatkan pemeriksaan bagian fisik sumber, termasuk mencocokkan ejaan dan tahun penerbitan buku dan jurnal yang diperoleh. Keaslian sumber diperiksa melalui beberapa pertanyaan, seperti tanggal pembuatan, tempat asal, pencipta, komposisi bahan, dan apakah sumber tersebut dalam bentuk asli atau tiruan (Abdurrahman, 2019: 108-110).

Peneliti telah menguji berbagai sumber yang terkumpul, seperti contoh buku *Dinamika Islam Filipina* yang diterjemahkan oleh Eddy Zainurrry Tahun 1989, dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta. Penulis buku aslinya adalah Caesar Adib Majul dengan

judul asli *The contemporary Muslim movements in the Philippines* yang diterbitkan di Mizan Press, Michigan USA pada tahun 1985.

Demikian pula, jurnal yang diperoleh oleh peneliti mencakup judul, seperti "*The Moro National Liberation Front in the Philippines*". Yang ditulis oleh Lela Garner Noble yang diterbitkan oleh *Pacific Affairs*, University of British Columbia. Online Vol. 49, No. 3. 10 September 2012.

b) Kritik Internal

Kritik internal, berbeda dengan kritik eksternal, berfokus pada aspek-aspek intrinsik, khususnya isi sumber, yang terdiri dari kesaksian (*testimony*) (Sjamsuddin, 2003: 143). Setelah fakta kesaksian dikonfirmasi melalui kritik eksternal, sejarawan bertanggung jawab untuk menilai keandalannya.

Sebagaimana diuraikan dalam diskusi sebelumnya tentang pengumpulan sumber, kesaksian sejarah merupakan penentu utama keaslian dan bukti dari fakta-fakta sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika para peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam hal waktu atau lokasi kejadian di antara sumber-sumber yang diperoleh, mereka cenderung memprioritaskan dan

lebih memilih sumber-sumber primer daripada sumber-sumber sekunder.

Seperti contoh informasi berdirinya organisasi Moro National Liberation Front (MNLF), dalam informasi yang ada di buku Caesar Adib Majul dan Web Archive dalam Repository Library of Congress, Washington, D.C., 20540 USA. (sumber primer peneliti) didirikan pada tahun 1972 di Filipina Selatan. Sedangkan sumber lain (sekunder) dalam repository.upi.edu. menginformasikan berdirinya MNLF pada tahun 1971.

Pada informasi sumber sekunder tersebut kiranya kurang tepat atau terbukti jika CMYA berdiri pada 1971. Hal ini yang harus dilihat dan dianalisis adalah sebab terbentuknya MNLF. Pada saat itu Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) adalah sebuah organisasi politik di Filipina yang didirikan dan diresmikan pada tahun 1972. Front ini dimulai sebagai kelompok sempalan dari Gerakan Kemerdekaan Muslim. MNLF adalah organisasi terkemuka di kalangan separatis Moro selama sekitar dua dekade sejak tahun 1971an (awal pergerakan). Pada tahun

1996, MNLF menandatangani perjanjian perdamaian penting dengan Filipina.

3. Interpretasi

Interpretasi, yang juga dikenal sebagai analisis sejarah, sering disebutkan dalam wacana sejarah. Analisis, menurut definisi melibatkan pembedahan informasi, berbeda dengan sintesis, yang melibatkan pengintegrasian informasi. Meskipun demikian, baik analisis maupun sintesis dianggap sebagai pendekatan utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995: 100).

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Pada tahap akhir dari metode sejarah, historiografi berfungsi sebagai metode untuk menyampaikan, mempresentasikan, atau mendokumentasikan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Analog dengan laporan penelitian ilmiah, mengartikulasikan temuan-temuan penelitian sejarah harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang perjalanan penelitian, mulai dari tahap perencanaan awal hingga penarikan kesimpulan. Melalui penyusunan sejarah, menjadi mungkin untuk mengevaluasi apakah penelitian tersebut mengikuti metodologi yang telah ditentukan, apakah sumber atau data yang mendasari kesimpulannya memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, dan pertimbangan

terkait lainnya. Oleh karena itu, kualitas penelitian sejarah bergantung pada cara pengungkapannya (Abdurahman, 2019: 116-117).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menerangkan isi dalam penelitian ini, maka perlu cara penulisan yang baik. Hal ini agar mempermudah penulis dalam menyusun penelitian yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendeskripsikan latar belakang lahirnya gerakan separatisme *Moro National Liberation Front* di Filipina Selatan. Pada bab ini terdiri dari sub-bab: Kehidupan Nur Misuari, Lahirnya gerakan separatisme Moro National Liberation Front, Faktor-faktor pendukung lahirnya Moro National Liberation Front, Respon Muslim Moro dan Negara-negara Islam terhadap lahirnya gerakan Separatisme Moro National Liberation Front.

Bab ketiga, mendeskripsikan sejarah perkembangan gerakan separatisme Moro National Liberation Front. Pada bab ini terdiri dari sub-bab: Sejarah Organisasi Moro National Liberation Front, faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan Separatisme.

Bab keempat, Gerakan Separatis Nur Misuari Dalam Memperjuangkan minoritas Muslim Moro Menuju Perdamaian. Pada bab ini terdiri dari sub-bab: Potret Muslim Moro, Upaya dalam mencapai Perdamaian, Perjanjian Tripoli 1976 dan Perjanjian Damai (*Peace Agreement*) 1996.

Bab kelima, yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

LAHIRNYA GERAKAN SEPARATISME *MORO NATIONAL LIBERATION FRONT*

A. Kehidupan Nur Misuari

1. Profil Nur Misuari

Nurullaji Pining Misuari lahir pada tanggal 3 Maret 1939 di Desa Kabingaan, Pulau Tapul, Kepulauan Sulu Tengah. Nur Misuari adalah seorang pemimpin politik dan militer yang berasal dari Filipina. Ia dikenal sebagai pendiri dan mantan ketua dari Front Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front atau MNLF), sebuah kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan dan hak-hak Muslim Moro di Mindanao, Filipina Selatan. Ia merupakan tokoh penting dalam sejarah konflik di Mindanao, yang dimulai pada awal 1970-an. MNLF, di bawah kepemimpinannya, melancarkan perjuangan bersenjata melawan pemerintah Filipina untuk mendirikan negara Muslim yang merdeka di wilayah selatan negara tersebut. Pada tahun 1996, Nur Misuari menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Filipina, yang kemudian memberikan otonomi khusus kepada beberapa wilayah di Mindanao, yang dikenal sebagai Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM). Setelah perjanjian damai tersebut, Misuari menjadi gubernur pertama ARMM, namun kemudian dituduh melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Setelah periode konflik internal dalam MNLF dan ketidakpuasan terhadap implementasi perjanjian damai,

Misuari terlibat kembali dalam perlawanan bersenjata, yang membuatnya kembali menjadi buronan pemerintah Filipina. Namun, ia masih dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di antara komunitas Muslim Moro di Filipina (Stem, 2012: 25).

2. Nur Misuari Masuk Dunia Politik

Nur Misuari, seorang tokoh penting dalam sejarah politik dan perjuangan di Filipina, terkenal sebagai pendiri dan pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). MNLF adalah sebuah organisasi separatis yang memperjuangkan otonomi dan hak-hak politik bagi Muslim Moro di Mindanao, sebuah wilayah di Filipina selatan yang memiliki populasi Muslim yang signifikan. Misuari masuk ke dunia politik dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat Moro. Pada tahun 1976, di bawah kepemimpinan Misuari, MNLF mencapai kesepakatan dengan pemerintah Filipina melalui Perjanjian Tripoli, yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada wilayah-wilayah mayoritas Muslim di Mindanao. Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan ini tidak berjalan mulus, yang kemudian menyebabkan ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah Filipina dan kelompok-kelompok separatis Moro (Stem, 2012: 30).

Pada tahun 1996, setelah bertahun-tahun pertempuran dan negosiasi, Misuari menandatangani Perjanjian Damai Final dengan pemerintah Filipina, yang memberikan otonomi kepada Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM). Setelah perjanjian ini, Misuari menjabat

sebagai Gubernur ARMM. Namun, kepemimpinannya di ARMM menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, termasuk tuduhan korupsi dan pemerintahan yang tidak efektif (McKenna, 1988: 117).

Keterlibatan Misuari dalam politik adalah bagian integral dari upayanya untuk mencapai tujuan-tujuan MNLF dan memperjuangkan hak-hak orang Moro. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, pengaruh Misuari dalam politik Filipina, khususnya dalam perjuangan untuk otonomi Muslim di Mindanao, tetap signifikan (Thomas, 1971: 87).

B. Latar Belakang Lahirnya Gerakan Separatisme Moro National Liberation Front.

Istilah Separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat didalamnya disebut kaum separatist. Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional pada hakekatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk

bergabung dengan negara lain {integration), atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas (Partiana, 1990: 370).

MNLF berawal dari nasionalisme masyarakat yang terpinggirkan, yang menghadapi tantangan dari perubahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka. Gerakan ini bersifat agak radikal. Masyarakat Muslim Filipina di bagian selatan negara itu disebut Bangsa Moro. Menurut Theodorson, karena sebagian besar orang yang terlibat dalam gerakan ini berpartisipasi secara informal atau secara tidak langsung, gerakan ini dianggap sebagai gerakan sosial (Mubarak, 1993: 51).

Gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Profesor Nur Misuari dari Universitas Filipina dikenal dengan nama MNLF, yang sejak dekade 1970-an berusaha memisahkan diri dari Filipina sebagai tanggapan atas marjinalisasi Bangsa Moro oleh pemerintah Filipina. Seiring berjalannya waktu, MNLF mengalami berbagai perubahan pandangan. Dalam hal ideologi, MNLF mengidentifikasi diri sebagai nasionalis-sekuler, tidak seperti Islam. Latar belakang pribadi Nur Misuari secara signifikan membentuk ideologi yang diadopsi oleh organisasi, mengingat keterlibatannya dalam gerakan sosialis Islam selama masa sekolahnya. Bahkan Selamat Hashim, wakilnya yang kemudian berpisah untuk mendirikan Moro Islamic Liberation Front (MILF), mengklaim bahwa Nur Misuari mengubah filosofi organisasi ke arah yang lebih komunis sebagai tanggapan atas perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah

Filipina di berbagai pemerintah. Akibatnya, MNLF berkembang menjadi sebuah kelompok yang berjuang menentang pemerintah Filipina karena ketidakadilan yang dialami oleh komunitas Muslim Filipina, terutama di Kepulauan Sulu dan Mindanao (Majul, 1990: 230).

Caesar Adib Majul, dalam karya terbarunya, *The Contemporary Moslem Movement in the Philippines*, yang dikutip dari buku Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, menyatakan hal tersebut bahwa:

“Tiga aspek menentukan gerakan Muslim Moro: peningkatan kesadaran akan Islam sebagai kebangkitan Muslim: komitmen untuk meningkatkan struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat mereka agar dapat mencapai cita-cita Islam dengan lebih baik: dan upaya terus menerus untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan yang mengganggu atau mengancam ketaatan masyarakat terhadap cita-cita Islam tersebut” (Muzani, 1993: 311).

Di Pagalungan, Provinsi Cotabato, Datu Utdoh Matalam, pendiri Gerakan Kemerdekaan Islam (MIM), yang berasal dari Filipina Selatan, menandatangani sebuah manifesto yang mengadvokasi penyatuan seluruh wilayah Filipina Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam ke dalam sebuah negara yang diberi nama Republik Mindanao dan Sulu. Manifesto 1968 menandai dimulainya upaya yang lebih terorganisir untuk memisahkan diri dari pemerintah Filipina. Menanggapi manifesto tersebut, “Gerakan Muslim Independen” dibentuk, yang kemudian berganti nama menjadi “Gerakan Independen Mindanao (MIM)” karena dianggap tidak konsisten.

Gerakan MIM masih berfokus untuk mengumpulkan perhatian dan dukungan dari umat Islam sampai muncul seorang pemimpin yang dapat diikuti oleh para anggotanya (Alchaidar, 1999: 38). Gerakan ini menyerukan berdirinya Republik Islam di Mindanao dan Sulu. Akibatnya, pada tahun 1968 atau 1969, sebuah kelompok bersenjata bernama Tentara Bangsa Moro didirikan di Sulu, yang kemudian berkembang menjadi pasukan gerilya yang sangat terorganisir dan terlatih (Kuntowijoyo, 1991: 73). Sementara itu, situasi keamanan di Filipina mendorong gerakan ini ke arah yang lebih ekstrim dan tegas, yang dicontohkan dengan pembantaian Pulau Corregidor (Alchaidar, 1999: 38).

Peneliti Kamarulzaman Askandar, yang menulis buku *Mindanao Conflict*, menyatakan:

“Memahami sejarah Moro memerlukan pemahaman tentang sejarah lima abad yang lalu. Kita dapat melihat bagaimana Bangsamoro menentang orang Spanyol dan mencoba menjajah mereka. Orang Spanyol menyebut mereka Moro karena mereka sebelumnya berperang melawan Muslim di Afrika Utara, yang dikenal sebagai Moors. Saat tiba di Asia Tenggara, mereka bertemu dengan orang-orang Muslim yang menentang penjajahan mereka. Setelah penjajahan Spanyol, Muslim Moro menentang Amerika Serikat, yang mengambil ahli kekuasaan dari Spanyol pada abad ke-19. Mereka kemudian menentang pemerintahan Filipina karena mereka tidak ingin diperintah oleh non-Muslim di luar wilayah mereka. Untuk mengakhiri kisah, kita dapat melihat bagaimana gerakan kemerdekaan Moro untuk kemerdekaan muncul pada tahun 1950-an dan 60-an. MIM dan MNLF didirikan setelah peristiwa pembantaian Corregidor atau Jabidah Masarce pada tahun 1968”.

Dalam kaitannya dengan sudut pandang Kamarulzaman Askandar, perspektif ini membantu kita mengetahui asal-usul masalah Muslim Moro di Mindanao, yang dimulai dengan tragedi Jabidah. Pada awalnya, para elit tua

(sultan di Mindanao) cenderung menyikapi tragedi Jabidah dan penerapan Undang-Undang Perang yang semakin memarginalkan masyarakat Mindanao melalui cara-cara kultural dan ekonomi. Para sultan Mindanao melihat peristiwa ini sebagai berasal dari benturan budaya (Surwandono, 2013: 3).

Masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan mengalami dampak yang signifikan dari Tragedi Jabidah. Peristiwa ini memicu pemberontakan militer Kristen terhadap penduduk Muslim di wilayah tersebut. Kemunculan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) mewakili gerakan baru yang dipimpin oleh kaum muda Muslim dari Universitas-universitas di Filipina Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh orang-orang Moro, termasuk individu-individu dari berbagai komunitas Muslim Moro seperti Mauguindanao dari Cotabato (Mindanao), Marano atau Iranun dari Lanao (Mindanao), dan Palawani atau Molbog dari Palawan. Hal ini bukan semata-mata karena kesetiaan kepada sultan, tetapi lebih karena perbedaan komunitas Muslim Moro yang tersebar di seluruh Filipina (Majul, 1989: 42).

Sebagai ketua MNLF, Nur Misuari memandang konflik di Mindanao sebagai konflik rasial, dan mengaitkannya dengan genosida yang menyasar komunitas Muslim. Misuari meminta komunitas Islam di seluruh dunia untuk mempertimbangkan masalah konflik Mindanao, karena kebijakan pemerintah Filipina telah mengorbankan etnis Islam secara signifikan. Selain itu, Misuari mendesak semua datuk di Mindanao untuk bersatu dan

memohon kepada pemerintah Filipina untuk menghentikan genosida, diskriminasi, dan marjinalisasi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di daerah tersebut. Melalui penerbitan Manifesto Moro, Misuari menciptakan dasar untuk organisasi pembebasan Moro Nasional (Surwandono, 2013: 3).

Setelah kemerdekaan, kelas Muslim berpendidikan muncul di Mindanao karena langkah-langkah politik pemerintah yang berprinsip. Mereka adalah pemimpin baru yang terdidik dan kontemporer. Mereka biasanya bergantung pada kemampuan dan pengetahuan yang diwariskan dari sistem sosial feodal atau datu. Nur Misuari, yang juga dikenal sebagai Nurallaj Misuari, adalah pengagas (Hidayat, dkk, 2013: 79). Seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dari suku Tausug di Jolo, yang mendapatkan beasiswa melalui program politik etis pemerintah, kemudian naik menjadi profesor di bidang studi Islam di Universitas Filipina. Dia menjabat sebagai pelopor dan pemimpin MNLF. Namun, Salamat Hasyim, yang berasal dari suku Maguindanao di Cotabato, kemudian mendirikan dan memimpin MILF. Dia adalah berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, ia dianugerahi beasiswa oleh pemerintah Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar di Kairo (Sauedy, 2012: 147-148).

Sebuah wawancara dengan Komandan Bangsa Moro Army (MNLF), yang diberi nama "Ulang Utan" pada bulan April 1974, menjelaskan motivasi di balik pembentukan MNLF oleh Bangsa Moro. Alasan-alasan ini termasuk pembantaian Corregidor, perampasan tanah, dan kekecewaan yang

meluas terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kepemimpinan MNLF akhirnya bergabung dengan Malaysia sebagai akibat dari peristiwa Corregidor yang signifikan. Pada tahun 1969, pemerintah Malaysia melatih kelompok pemberontak di pulau Pangkor di Malaysia Barat dan kemudian di Sabah (Alchaidar, 1999: 135).

Perlawanan terhadap ketidaksetaraan dan diskriminasi, pengalihan tanah yang terus berkelanjutan, dan kepemimpinan politik yang di Mindanao tidak lagi memadai tanpa adanya struktur pemerintah yang efektif. Sejak berakhirnya perang dunia kedua, para pemimpin yang berpendidikan telah secara aktif berpartisipasi dalam perlawanan sadar terhadap dominasi dan kolonialisme Barat di berbagai wilayah di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Baik Nur Misuari maupun Selamat Hasyim muncul sebagai aktivis dan pemimpin dalam gerakan mahasiswa di kampus-kampus mereka, mengadvokasi melawan pemerintahan yang tidak adil dan penindasan kolonial. Dengan melihat apa yang terjadi di daerah asalnya, Mindanao, termasuk pembantaian Jabidah dan insiden Ilaga, mendorong mereka untuk bersatu dan menggerakkan Muslim Mindanao untuk melawan pemerintahan pusat (Alchaidar, 1999: 147-148).

Pemimpin politik Islam Filipina, Nur Misuari, muncul untuk mengadvokasi perjuangan Muslim Moro melalui berbagai organisasi setelah terjadinya pembantaian terhadap Muslim Moro di Corregidor selama Tragedi Jabidah (Majul, 1989: 42). Nur Misuari berusaha untuk

mengupayakan resolusi konstitusional pada tahun 1971. Misuari sangat diharapkan oleh masyarakat Mindanao sebagai seorang intelektual muda yang berjuang untuk mengangkat daerahnya. Namun, kegagalannya tidak disebabkan oleh sabotase atau campur tangan politik dari para politisi Katolik, namun secara tragis berasal dari para pemimpin Islam yang tidak mau melepaskan posisi mereka di Kongres.

Misuari, yang tidak puas dengan kepemimpinan Islam, kembali ke kampung halamannya di Manila dan mendalangi serangan bersenjata terhadap pemerintah pusat Filipina. Dia bersekutu dengan para intelektual muda Islam Filipina yang belajar di Jeddah, Arab Saudi. Awalnya, para intelektual muda yang kecewa dari Mindanao ini membentuk sebuah kelompok diskusi. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi *Moro National Liberation Front*, yang memiliki sayap militer yang kuat (Alchaidar, 1999: 39).

Nur Misuari adalah orang yang mencetuskan berdirinya Front Pembebasan Nasional Moro. Keterlibatannya dalam protes terhadap tragedi Jabidah di Pulau Corregidor membuatnya terpapar pada tindakan penindasan pemerintah. Pengalaman ini membuat Misuari, seorang keturunan Tausug, mempertahankan tekadnya untuk melawan perlakuan tidak adil pemerintah terhadap umat Islam, meskipun ada kemunduran yang dialami oleh komunitas Muslim Moro di Tausug dan Samal. Dalam sebuah acara di Istana Malacanang, Misuari berpartisipasi dengan para pelajar Muslim Moro dari Manila dalam sebuah demonstrasi. Setelah demonstrasi

tersebut, mereka menyimpulkan bahwa mendirikan daerah otonomi Islam adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari kendali Manila dan membangun masyarakat Moro yang merdeka.

MNLF merupakan organisasi pembebasan Muslim Filipina, yang berupaya untuk melakukan tindakan radikal untuk mencapai kemerdekaan atau paling tidak, otonomi daerah untuk Filipina Selatan (Gross, 2007: 183).

M. Abdul Karim menegaskan bahwa:

“Sampai sekarang ini, terdapat komunitas Muslim yang menginginkan pemerintahan sendiri atau kedaulatan di berbagai negara. Ini termasuk populasi Muslim minoritas di wilayah-wilayah seperti Kashmir di India, Moro di Filipina, Patani di Thailand, serta Cenia, Kazan, Krimea di Federasi Rusia, dan wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim di Semenanjung Balkan. Sebagai minoritas, mereka sering menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebebasan beragama. Ini adalah alasan mengapa mereka membutuhkan kebebasan dan kemerdekaan” (Karim, 2014: 359).

Gerakan MNLF pada awalnya adalah gerakan separatis, bukan gerakan separatis seperti yang sering dilabeli oleh media Barat. Sebagai kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan, MNLF sering menggunakan idiom-idiom mitos Islam. Selama era Perdana Menteri Sabah Tun Mustapha, para pemuda Muslim Filipina yang dilatih di Sabah, Malaysia, sering menamai kelompok-kelompok perlawanan bersenjata mereka dengan istilah-istilah mitos seperti Darul Islam, “NIM” di Cotabato, “Lamalip” di Lanao, Ikhwanul Muslimin (al-ikhwan al Muslimin) di Jolo, dan “Pengawal Hijau” di Zamboanga dan Basilan.

Sebagai bagian dari perang suci mereka (Jihad jiwa atau juramentado), MNLF memperoleh senjata dari pasukan tentara Filipina

yang dirampas dan menerima dukungan substansial dari negara-negara yang bersimpati seperti Libya dan Malaysia. Pada tahun 1987, diperkirakan 3.000 perwira Moro telah menerima pelatihan komando di Libya, Mesir, Suriah, Pakistan, dan Malaysia. Banyak ideologi tentang perang ditanamkan pada remaja Muslim Filipina di sekolah-sekolah Pandita. Keyakinan-keyakinan yang dimitoskan ini dapat secara signifikan memberdayakan praktik “pemujaan perang” ini. Selain kata-kata "kebebasan", "kemerdekaan", dan "cara hidup Islam", tokoh-tokoh MNLF sering menggunakan kata-kata seperti “kemenangan” dan “penguburan”, yang sering diakhiri dengan Mahardika (Alchaidar, 1999: 86). Gerakan-gerakan biasanya berusaha untuk menarik simpati dan dukungan dengan menarik berbagai saluran kepercayaan massa.

Menurut MNLF, budaya kolonial mewakili peradaban Kristen. Ini dimulai dengan peristiwa tahun 1968, yang memicu kesadaran revolusioner di kalangan penduduk Muslim, yang mengarah pada berdirinya Front Pembebasan Nasional Moro. MNLF, sebuah organisasi nasional yang terinspirasi oleh gerakan anti-kolonial, didirikan secara sembunyi-sembunyi pada akhir tahun 1971. MNLF merupakan kelompok perlawanan yang mirip dengan kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Dunia Ketiga, seperti FLN (Front Pembebasan Nasional) di Aljazair, PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) di kalangan orang Arab Palestina, dan PULO (Organisasi Pembebasan Pattani) di kalangan orang Melayu di Thailand

Selatan (Gross, 2007: 183). Meskipun demikian, gerakan-gerakan Islam seperti MNLF, FLN, PLO, dan PULO memiliki tujuan utama berikut:

Pertama, mengembalikan kepercayaan diri umat Muslim. Mereka mengalami keraguan, kelemahan, kurangnya iman karena kekalahan mereka. Para pemimpin gerakan Islam menyatakan, “sesungguhnya, perhatian utama dakwah kita, dan fokus penting dalam kemunculan, perkembangan, dan penyebarannya, adalah kebangkitan spiritual.” Mereka menekankan perlunya jiwa yang hidup, kuat, dan perkasa, hati yang segar dan bersemangat, perasaan yang bergairan dan membara, semangat yang menggebu-gebu, pandangan jauh ke depan, cita-cita yang tinggi, dan tujuan-tujuan yang luhur untuk mengilhami dan menggerakkan jiwa ke arah cita-cita ini dan pada akhirnya mencapainya.

Kedua, membuat umat Islam bersatu melalui pemahaman yang kuat tentang Islam. Dengan menekankan prinsip belajar sebelum bertindak. Umat Islam tidak dapat memiliki perjalanan yang lurus dan orientasi yang padu tanpa pemahaman yang sama. Penyerang Islam telah memahami pentingnya pemikiran ini. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengisi perpustakaan Islam dengan pemikiran-pemikiran mereka, yang sering kali mengandung berbagai kesalahpahaman dan penyimpangan.

Ketiga, membebaskan negara-negara Islam dari segala bentuk intervensi luar. Akibatnya, gerakan Islam secara konsisten berpartisipasi dalam perang pembebasan di Turki, Afrika Utara, Mesir, Sudan, Nigeria, Palestina, Suriah, Irak, Indonesia, Pakistan, India, dan negara-negara Islam

lainnya. Dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan mengembalikan kehormatan dan kebesaran negara mereka, kaum Muslimin telah melakukan tindakan yang sangat baik (Thahhan, 2000: 34-37).

Meskipun gerakan Islam yang disebutkan di atas memiliki tujuan utama, mereka bekerja untuk mencapainya. Berbeda dengan gerakan MNLF, gerakan ini bertujuan untuk mendorong dukungan masyarakat Moro secara keseluruhan, termasuk perekrutan, pelatihan, dan dukungan internasional. Jelaslah bahwa MNLF berdiri sendiri untuk mencapai kemerdekaan politik Filipina (Gross, 2007: 183). Pada awalnya, lebih dari 10.000 anggota MNLF adalah kombatan, yang secara bertahap menerima pelatihan militer di Libya. Nur Misuari adalah salah satu tokoh terkemuka di Mindanao, termasuk di antara mereka yang dilatih pada gelombang pertama, yang dikenal sebagai "Top 90". Selamat Hashim, yang kemudian mendirikan MILF (Moro Islamic Liberation Front), dan Muhammad Ibrahim Murrad menerima pelatihan militer pada gelombang kedua, yang disebut "Gelombang 300", yang berlangsung di Penang, Malaysia (Surwandono, 2013: 4). MNLF untuk Bangsamoro memperoleh kekuatan di bawah kepemimpinan baru Nur Misuari. Islam digunakan sebagai identitas dan simbol pembangkangan politik, serta melawan label Filipina sebagai primitif, biadab, atau tidak berbudaya dalam tradisi dan politiknya. Misalnya, MNLF berhasil membentuk Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BAF) yang terdiri dari 20.000 hingga 30.000 tentara, termasuk laki-laki dan perempuan (Sauedy, 2012: 149).

Setelah konsolidasi pada tahun 1972, struktur politik Gerakan MNLF mencerminkan struktur militer. Gerakan ini diorganisir dengan komite pusat, dua puluh komite, biro politik, biro propaganda dan intelijen, serta komite-komite di tingkat provinsi dan barrio. Sayap bersenjata, Tentara Bangsamoro (BMA), beroperasi di bawah komando komite pusat dengan seorang marsekal lapangan sebagai pemimpinya. Di tingkat provinsial, ada komando zonal dan provinsi. Struktur ini mirip dengan partai komunis atau organisasi sosialis di negara sosialis.

Mahasiswa Nur Misuari memiliki hubungan dekat dengan Jose Maria Sison, pendiri Partai Komunis Filipina (CPP), dan dikenal memiliki hubungan dengan kaum Marxis dan Maois. Misuari sendiri mendirikan organisasi mahasiswa yang berorientasi Marxis, Kabataang Makabayan (Pemuda Patriotik), yang terkait dengan Tentara Rakyat Baru yang berorientasi Maois dan menentang perjuangan Muslim. Akhirnya, Misuari mengalihkan fokus politiknya dan mendirikan MNLF, organisasi klandestin dan sayap militer Bangsamoro, di mana ia menjadi ketuanya. Pada awalnya, upaya Misuari tidak berjalan dengan baik karena Bangsamoro, yang memiliki mayoritas Muslim, mengira dia adalah seorang komunis. Namanya segera melejit setelah menunjukkan kesetiaan agamanya. Misuari dan istrinya, Desdemona Tan, tinggal di Timur Tengah setelah perang tahun 1972 hingga 1988 (Alchaidar, 1999: 80-81).

Seorang pengacara bernama Macapanto Abbas Jr. membangun dan mengisi gerakan MNLF dengan ideologi Islam. Istilah “MNLF”

mencerminkan akar sejarah dan tujuannya: “Moro” menandakan perlawanan yang sedang berlangsung terhadap penjajahan Spanyol, sementara “Front Pembebasan Nasional” menunjukkan tujuan gerakan ini untuk memisahkan diri dari Filipina dan membentuk sebuah negara merdeka. Istilah “Nasional” digunakan untuk menekankan bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk mendapatkan otonomi atau persamaan hak. (Alchaidar, 1999: 39-40).

Taufik Abdullah dan Sharon Siddique mengatakan bahwa:

“Penyebaran Islam di Filipina dapat dilihat dari dua perspektif. Di satu sisi, Moro National Liberation Front (MNLF), mewakili minoritas dalam komunitas Muslim. Di sisi lain, warga Muslim yang mengadvokasi perubahan sosial yang lebih luas cenderung memiliki pandangan yang lebih moderat. Meskipun kebangkitan Islam sering dikaitkan dengan interpretasi militan, manifesto MNLF menggarisbawahi pentingnya mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai “Bangsa Moro” (Abdullah & Shiddique, 1988: 347).

Sementara itu, Arzumardi Azra dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Asia Tenggara menyatakan bahwa bahwa:

“Ada dua perspektif yang muncul terkait kebangkitan Islam di Filipina. Yang pertama diperjuangkan oleh para aktivis Moro National Liberation Front (MNLF), yang pada awalnya merupakan kelompok minoritas di kalangan Muslim. Yang kedua adalah perspektif moderat yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam yang menginginkan perubahan sosial yang lebih luas” (Abdullah, dkk, 2002: 479).

Terlepas dari klaim Taufik Abdullah, Sharon Siddique, dan Arzumardi Azra bahwa MNLF menandakan kebangkitan Islam di Filipina, penting untuk mempertimbangkan penelitian yang lebih luas mengenai Islam di Asia Tenggara yang menarik minat akademis. Ada beberapa alasan untuk peningkatan perhatian ini. Yang paling utama, perkembangan Islam di

Asia Tenggara sangat luar biasa, terutama ketika ditelaah dalam konteks wacana global tentang transformasi yang dibawa oleh globalisasi. Dalam hal ini, Islam di Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu yang paling maju, sebanding dengan Pakistan, dan didukung oleh para ahli yang berpengaruh di Amerika Serikat. Kedua, pendekatan pendidikan para cendekiawan Muslim di Asia Tenggara sebagian besar dipengaruhi oleh konsep-konsep ilmu sosial yang dikembangkan di Barat. Ketiga, Islam Asia Tenggara dengan jelas mencontohkan secara nyata apa yang dikenal sebagai Islam Lokal.. Ini menunjukkan perpaduan intelektual dan budaya antara Islam dan budaya lokal. Diversitas etnis dan suku di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana Islam dapat membentuk dan beratahan suatu komunitas (Anwar, dkk, 2014: 54-55).

C. Faktor-faktor Pendukung Lahirnya Moro National Liberation Front

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemunculan dan kelangsungan sebuah gerakan. Dalam kasus MNLF, alasan-alasan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dukungan dari OKI dan negara-negara Timur Tengah.
2. Persatuan di antara umat Islam Filipina, terutama setelah “Pembantaian Jabidah” atau Insiden Corregidor pada tahun 1966. awal-awalnya terutama setelah “Jabidah Massacre” atau Peristiwa Corregidor tahun 1968. Persatuan kolektif seluruh Muslim Filipina ditunjukkan oleh manifesto

pembentukan Republik Bangsa Moro, yang mengadvokasi pembentukan Negara Islam.

3. Dukungan dari Kaum Tani (Hulk) dan penduduk pedesaan. Mayoritas Muslim Filipina, yang merupakan petani, mendukung perjuangan bersama dengan para intelektual dan politisi di parlemen.
4. Disintegrasikan struktur demokrasi, dengan berbagai gerakan yang menantang pemerintah, yang memungkinkan adanya tuntutan otonomi atau kemerdekaan.
5. Karena perbedaan budaya antara Utara dan Selatan, gerakan MNLF jelas memiliki alasan untuk terus bertahan, dan intelektual penggeraknya juga menjadi faktor kemajuan. MNLF untuk memulai gerakan isolasi. Setidaknya, pembelahan imperialisme Barat terhadap budaya Utara dan Selatan juga memengaruhi perjuangan bersenjata. Asia Tenggara muncul sebagai akibat dari imperialisme, "Perang Salib", di mana bagian utara beragama Kristen dan bagian Selatan beragama Islam.
6. Upaya diplomatik sangat penting dalam skala global untuk mengatasi kebutuhan yang meluas dan mendesak akan penyelesaian masalah Muslim Moro. Karena booming minyak, dukungan dari negara-negara Timur Tengah memungkinkan MNLF untuk terus berjuang secara

ideologis dan ekonomis. Didukung oleh diplomasi global yang difasilitasi oleh entitas Islam seperti Rabithah alAlam-al Islam, yang juga disebut sebagai Liga Dunia Islam, yang mengakui MNLF sebagai Liga Dunia Islam, yang mengakui MNLF sebagai kelompok organisasi utama untuk komunikasi Moro (Alchaidar, 1999: 61-62).

Kita dapat melihat bahwa selain faktor-faktor di atas yang mendukung pendirian MNLF, ada pemuda Muslim yang belajar di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran memiliki akses terhadap berbagai kesempatan untuk belajar tentang politik, masyarakat, dan bahkan militer. Sekembalinya mereka ke daerahnya, mereka menyadari bagaimana pemerintah mendiskriminasi mereka, jadi mereka sadar akan pentingnya belajar di luar negeri dan tidak akan membiarkan diskriminasi terjadi. Ketika Nur Misuari, seorang akademisi yang bekerja di luar negeri, bersedia menjadi ketua MNLF, remaja-remaja ini juga bersedia bergabung. Karena sekolah pandita memberikan ideologi tentara perang kepada pemuda Muslim Filipina, mereka seperti pesantren di Indonesia, dayah, atau rangkang di Aceh adalah salah satu faktor pendukung awal MNLF. Keyakinan-keyakinan yang dimitoskan ini dapat menjadi pemimpin dalam praktik "ibadah perang" (Alchaidar, 1999: 86). Banyak yang bergabung dengan MNLF karena mereka telah diajari oleh aliran pandita untuk mengagungkan perang.

Bangsa Spanyol tiba di Filipina pada abad ke-16 dengan tujuan mendirikan koloni dan mengonversi penduduk, terutama penduduk asli, menjadi Kristen. Setelah mereka berhasil mengkristenkan penduduk asli, para mualaf baru ini digunakan sebagai sekutu, bertugas sebagai tentara atau pelempar tombak dalam pertempuran melawan desa-desa dan benteng-benteng Islam. Konflik berkepanjangan antara Spanyol dan Muslim ini dikenal sebagai Perang Moro. Akibatnya, Perang Moro menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan antara umat Kristen dan Muslim di Filipina (Majul, 1989: 9-11).

Spanyol melancarkan serangan terhadap Muslim Filipina, yang mereka sebut sebagai “Moro”, karena adanya persaingan dan konflik agama dan politik (Barangay). Upaya-upaya ini termasuk kekerasan, bujukan, dan taktik yang lebih halus seperti menawarkan hadiah, posisi sosial, dan perhatian untuk mendorong perpindahan agama ke Kristen. Namun, tidak semua Muslim di Filipina berpindah agama, terutama mereka yang berada di wilayah selatan seperti Sulu, Mindanao, dan sekitarnya. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menolak untuk pindah agama, tetapi juga memberikan perlawanan yang gigih. Akibatnya, hal ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara penjajah Spanyol dan kemudian, penjajah Amerika Serikat dan penguasa Filipina yang merdeka dan orang-orang Moro.

D. Respon Muslim Moro dan Negara-negara Islam Terhadap Lahirnya Gerakan Separatisme Moro National Liberation Front.

Setelah pembentukan MNLF, Presiden Ferdinand Marcos merespon gerakan dan berbagai pemberontakan Muslim di Mindanao yang dianggap sebagai pemberontakan dengan mengumumkan Darurat Militer pada tahun 1972. Ia mengerahkan pasukan Militer pada tahun 1972. Ia mengerahkan pasukan militer dalam jumlah besar ke Mindanao untuk menekan pemberontakan dan gerakan kemerdekaan yang semakin meningkat. Tanggapan keras dari presiden ini juga menggalang dukungan besar dari Bangsamoro untuk MNLF. Dukungan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat umum di Mindanao dan Sulu, tetapi juga dari kelompok-kelompok perlawanan yang telah lama ada seperti Gerakan Kemerdekaan Muallim (MIM), serta gerakan mahasiswa Moro di Manila dan luar negeri. Di bawah kepemimpinan Misuari, inisiatif mahasiswa juga mendapat dukungan dari para pemimpin konvensional yang dikenal sebagai datu (Sauey, 2012: 72).

Setelah deklarasi Darurat Militer, beberapa kombatan MNLF, termasuk Nur Misuari, menemukan diri mereka terdampar di Manila. Meskipun demikian, mereka berusaha mencapai wilayah selatan. Kadang-kadang, pasukan tentara disergap atau dipaksa mundur selama upaya penyitaan senjata di pedalaman Sulu. Lebih dari seribu orang diserang dalam suatu peristiwa, menyebabkan kehilangan banyak barang dan orang. Kemenangan tentara tidak diliput oleh surat kabar, tetapi meningkatnya pemberontak Islam yang dipersenjatai dengan senjata canggih mendapat

perhatian luas dari media. Karena keberhasilan awalnya, MNLF mendapat pengaruh yang lebih besar di antara kelompok-kelompok bersenjata Islam dan mencapai tingkat pengakuan (Majul, 1989: 65).

Sebagai pemimpin MNLF yang terkenal, Nur Misuari juga dianggap sebagai perwakilan Muslim Bangsamoro oleh masyarakat internasional. Meskipun semangat perlawanan melemah karena pembantaian dan serangan Ilaga, tuntutan kemerdekaan semakin kuat. Banyak orang Bangsamoro menjadi sukarelawan untuk MNLF atau Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BAF) untuk memerangi Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Selain para pria yang ikut bertempur, para wanita juga berkontribusi dengan bekerja di bidang logistik, perbekalan, dan dapur umum untuk mendukung pasukan perang (Sauedy, 2012: 72-73).

Sayap militer MNLF, yang dikenal sebagai Tentara Bangsamoro (BA), terdiri dari 20.000 hingga 30.000 anggota, yang mencerminkan semangat perlawanan MNLF yang kuat. Pada tahun 1973, perkiraan resmi menempatkan kekuatan Tentara Nasional Moro mencapai 15.000 orang. Jumlah ini berpotensi berlipat ganda dengan dukungan para pemimpin tradisional. Di Mindanao dan Sulu, terdapat sekitar 10.000 tentara, ditambah dengan dukungan 30.000 tentara sipil, terutama para pemukim (Majul, 1989: 66).

MNLF, yang dipimpin oleh Nur Misuari, didukung oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), Konferensi Menteri Luar Negeri Islam (ICFM),

dan Presiden Libya Muammar Khaddafi (Saifullah, 2010: 133). Sebagian besar, Nur Misuari membangun jaringan MNLF di luar negeri melalui hubungan pribadinya dengan Muamar Gaddafi. Melalui bantuan Gaddafi, Misuari berhasil mendapatkan akses ke OKI, sehingga mengglobalkan konflik Mindanao. Akibatnya, MNLF muncul sebagai perwakilan yang diakui oleh rakyat Mindanao (Surwandono, 2013: 65).

Ada beberapa alasan mengapa para kelompok konferensi Islam lebih memilih MNLF. Banyak pejabat dalam komunitas Islam di luar negeri mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap konflik dan ketidaksepakatan pemimpin yang terus-menerus. Banyak pemimpin Islam tradisional, dan banyak dari mereka lebih memperhatikan masalah pribadi atau keluarga di atas masalah-masalah Islam. Sebaliknya, para pemimpin Islam MNLF menunjukkan komitmen yang mendalam dan kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjaga dan menyatukan komunitas Islam. Ideologi pembaharuan dan idealisme MNLF, terutama Nur Misuari, membuat pemimpin Libya terkesan. Namun, yang paling penting, MNLF telah menunjukkan dirinya sebagai kelompok bersenjata Islam yang sangat kuat dan terorganisir secara militer. Libya selalu mendukung MNLF, dan setiap anggota ICFM sekarang dapat mendukung semua tujuan MNLF. Ini sangat penting untuk menghindari malaysia, yang telah melakukan upaya untuk mendamaikan perbedaan dengan Filipina (Majul, 1989: 71).

BAB III

PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME MORO NATIONAL LIBERATION FRONT

A. Sejarah Organisasi Moro National Liberation Front

Kondisi Muslim Moro di awal kemerdekaan, yang menunjukkan nasib mereka yang tidak kunjung membaik dan terus menderita tekanan dan diskriminasi dari pemerintah. Selama masa kepresidenan Ferdinand Marcos (1965–1986), penindasan pemerintah Filipina terhadap Muslim Moro semakin meningkat. Era yang berlangsung dari Jose Rizal hingga Fidel Ramos, ini merupakan periode paling menindas bagi Muslim Moro di Filipina, melebihi masa jabatan presiden (Hidayat, dkk, 2013: 75-76). Situasi bagi umat Islam juga tidak mengalami perbaikan (Saifullah, 2010: 132). Rezim Marcos yang dikenal sebagai pemerintah yang menerapkan tindakan-tindakan penindasan terhadap perbedaan pendapat di Mindanao, baik yang beragama Islam maupun komunis (Surwandono, 2013: 71).

Problem Muslim Moro diselesaikan setengah hati selama pemerintahan Ferdinand Marcos (Alchaidar, 1999: 37). banyak penahanan, pembunuhan, dan pengiriman militer sipil. Dengan berlakunya Undang-Undang Perang, pembantaian etnis Ilaga terhadap masyarakat Mindanao tampaknya menjadi kebijakan utama (Surwandono, 2013: 3). Hal ini terlihat jelas dalam "Peristiwa Jabidah" pada awal tahun 1968, di mana para pemuda Muslim menjalani pelatihan militer klandestin dan kemudian dibunuh secara kejam di sebuah pulau di Teluk Manila (Alchaidar, 1999: 37). Pada bulan

maret 1968, sekitar 28 pemuda yang ingin menjadi anggota militer, semuanya Muslim Moro, berada di bawah komando sebuah unit militer Katolik. Namun, penolakan tak terduga mereka untuk berpartisipasi dalam operasi berasal dari kesamaan agama (sesama Muslim), etnis (Melayu), dan hubungan dekat dengan kehidupan sehari-hari di Sabah dan Malaysia. Penolakan ini secara tragis menyebabkan pembantaian terhadap calon tentara Muslim (Sauedy, 2012: 53).

Pemerintahan Marcos menganggap penolakan ini sebagai bentuk perlawanan rakyat Mindanao terhadap pemerintahan otoriter (Surwandono, 2013: 3). Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai pembantaian Jabidah (*jabidah genocide*) (Sauedy, 2012: 53). Pada saat yang sama, muncul pasukan militer Kristen yang dikenal sebagai Ilaga, yang dipimpin oleh Kolonel Carlos Cajela dan Kapten Manuel Tranco. Kelompok rasialis Ilaga yang diskriminatif ini ditugaskan untuk mengincar umat Islam dengan merampas harta benda mereka dan melakukan kekerasan terhadap mereka.

Pada bulan Juni 1971, Ilaga membunuh 200 orang Muslim. Mereka membanggakan diri telah membunuh 50.000 orang umat Muslim, dan membakar lebih dari 500 masjid, 200 sekolah Islam, dan 20.000 rumah. Masalah Ilaga ini menarik perhatian dunia internasional, disamakan dengan KKK di Amerika. Pada bulan September 1971, 111 orang dibunuh di Bual, Tulan, dan Cotabato. Pada tanggal 22 September 1971, 36 orang lagi dibunuh di Tacub, Kauswaga, dan Lanodel Norte. Dari maret 1968 hingga

1972, sekitar 95.000 nyawa melayang, 300.000 orang mengungsi, dan banyak lahan pertanian yang rusak (Saifullah, 2010: 132).

Pergeseran yang signifikan terjadi dalam hubungan Katolik-Muslim di Mindanao pada tanggal 1 Mei 1968. Muslim Independence Movement (MIM), juga dikenal sebagai Gerakan Kemerdekaan Islam, didirikan oleh Datu Utdoh Matalam, mantan gubernur Cotabato. Gerakan Kemerdekaan Moro (MIM) bertujuan untuk mengadvokasi kemerdekaan Mindanao dan Sulu (Alchaidar, 1999: 38). Gerakan ini menjadi pendahulu bagi gerakan-gerakan berikutnya, termasuk MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayyaf yang mendapatkan dukungan dari negara-negara Islam dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Selama bertahun-tahun, gerakan separatis MNLF (*Moro National Liberation Front*) telah dilihat dari dua sudut pandang: Pemerintah Filipina menganggap gerakan ini sebagai pembontakan bersenjata dari etnis minoritas, sementara Bangsa Moro menganggap perjuangan mereka sebagai upaya untuk menentukan nasib sendiri. Di luar kategori ini, pemerintah Amerika Serikat yang saat ini melakukan perang melawan terorisme mendefinisikan gerakan separatis Bangsa Moro diidentifikasi sebagai organisasi teroris yang terkait dengan jaringan Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah (Budiwanti, 2003: 49).

Menurut Guimel M. Alim, Direktur Eksekutif Yayasan Kadtuntaya, dalam *Philippine Solidarity 2000*, perjuangan kemerdekaan Bangsa Moro yang telah berlangsung dari beberapa generasi. Selain itu, disebutkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan ini adalah perjuangan terlama di Asia dan

mungkin di dunia. Meskipun negosiasi terus berlangsung untuk proses perdamaian, upaya ini belum selesai hingga saat ini. Mereka berjuang untuk banyak hal, mulai dari mempertahankan kelangsungan hidup hingga memperoleh kemerdekaan (Alim, 1995: 1).

Tulisan berikut mencoba menggambarkan evolusi gerakan separatis dari awal hingga sekarang. Tidak ada solusi praktis untuk konflik atau prediksi masa depan. Gerakan ini berkembang meskipun perubahan dalam kehidupan sosial politik Filipina yang seringkali berubah-ubah. Perlawanan dan perundingan gerakan separatis Bangsa Moro dengan pemerintah bergantung pada seberapa cingkar represivitas suatu rezim. Semakin berkuasa rezim, semakin kuat gerakan separatis. Selain itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh faktor-faktor kunci yang mendorong gerakan separatis. Gambaran ini sangat penting untuk mengembangkan tindakan segera untuk mengatasi masalah separatisme Filipina. Untuk menangani gerakan separatis di berbagai negara, manajemen konflik sekarang berfokus pada kekerasan sebagai bagian dari kampanye melawan terorisme internasional. Oleh karena itu, analisis sosial yang menyeluruh kurang mempengaruhi pengelolaan konflik daripada tekanan luar dan perubahan politik internasional.

Dua hal utama akan dibahas dalam tulisan berikutnya. Pertama, akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya separatisme. Kedua, akan dibahas sejarah perkembangan separatisme. Untuk mengetahui akar masalahnya, faktor penyebab separatisme akan dijelaskan. Untuk

mempelajari sejarah gerakan separatis, kita juga harus mempertimbangkan ciri-cirinya, seperti fondasi ideologis dan etniknya. Hal ini penting untuk dievaluasi karena gerakan separatis terdiri dari banyak kelompok yang berbeda. Studi ini akan membahas organisasi separatis Nur Misuari yaitu Moro National Liberation Front (MNLF).

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gerakan Separatisme

Dalam mengeksplorasi gerakan separatisme, kekuatan pendorong di balik gerakan tersebut dapat ditelaah melalui berbagai perspektif atau kerangka kerja analitis, tergantung pada konteks masyarakat tertentu yang sedang dipertimbangkan. Studi ini menggabungkan berbagai sudut pandang, termasuk perspektif sejarah, sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Aspek historis bertujuan untuk menyelidiki keadaan awal atau pemicu utama yang mengarah pada munculnya gerakan separatis, karena banyak gerakan anti Bangsa Moro yang menyatakan bahwa integrasi Bangsa Moro ke dalam Filipina merupakan “penggabungan yang tidak bermoral dan ilegal.” Selain itu, analisis historis sangat penting untuk memahami pengaruh kolonialisme terhadap gerakan anti-Moro.

Namun, dari sudut pandang sosial budaya, perlawanan Moro disebabkan oleh kesenjangan ideologis antara Islam dan nilai-nilai sekulerisme Barat, serta konflik horizontal antara orang Moro dan orang Filipina yang sengaja dipicu oleh pemerintah Filipina. Diduga konflik ideologi dan sosial ini telah menyebabkan penindasan terhadap identitas sosial dan budaya Bangsa Moro. Kebijakan asimilasi kebudayaan yang

represif ini diduga menyebabkan dekulteralisasi dan hegemoni budaya, yang pada gilirannya mendorong masyarakat Moro ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Namun, karena hubungannya dengan identitas kolektif, dekulteralisasi dianggap akan meningkatkan integrasi internal. Sudut pandang politik sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah terhadap bangsa Moro, yang mencakup strategi seperti akomodasi politik seperti otonomi dan penindasan militer, berdampak pada perlawanan yang semakin meningkat dari Bangsa Moro terhadap pemerintah pusat dan pemerintah etnis Filipina.

Selanjutnya, bakal dibahas apakah pemerintah pusat dan kebijakan etnik Filipino menerapkan strategi pembersihan etnik terhadap penduduk Muslim Moro, serta bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada tumbuhnya gerakan separatis. Meskipun demikian, analisis ekonomi diperlukan untuk memeriksa pembagian sumber daya antara Bangsa Moro dan Filipino, serta konsekuensi dari pembagian ini terhadap munculnya gerakan separatis. Analisa ekonomi sangat penting karena gerakan separatisme biasanya dimulai dengan ketidakadilan yang berasal dari pembagian sumber daya. Berikut akan dideskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya gerakan separatis Bangsa Moro (Budiwanti, 2003: 51).

1. Politik Integrasi Kolonial

Faktor sejarah pengaruh dari politik integrasi kolonial terhadap wilayah yang dimiliki Bangsa Moro adalah salah satu faktor paling penting yang menyebabkan gerakan separatis Bangsa Moro. Pada

awalnya, Kepulauan Mindanao, Sulu, dan Palawan dihuni oleh sepuluh suku pedalaman dan 13 etnik muslim yang berbeda secara linguistik. Mereka memiliki otoritas untuk mengatur wilayahnya sendiri sebelum kedatangan kaum kolonialis. Berikut ini akan diberikan gambaran ringkas tentang efek integrasi kolonial di Kepulauan Mindanao. Selama bertahun-tahun, Bangsa Moro tetap menjadi entitas etnis yang terpisah dari Bangsa Filipina, yang saat ini merupakan mayoritas penduduk Filipina. Dr. Alunan C. Glang dan Romo Fransisco Combes, SJ memperkuat fakta sejarah tentang eksistensi Bangsa Moro, menurut Nuaim bin Abdul Haq. Dalam bukunya “A Nation Under Endless Tyranny”, Dr. Alunan C. Glang, mantan duta besar Filipina untuk Kuwait, mengutip D'Avitay sebagai berikut:

“sejak abad ke-16, Mindanao bukanlah sebuah pulau di Filipina”

Komunitas Moro telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi sebelum kedatangan Spanyol di Filipina pada awal abad ke-15 (Haq, 1994: 1). Mereka menjadi bagian dari wilayah yang diperintah oleh sultan Sulu dan Maguindanaw, yang menganut sistem kekhalifahan Islam. Selama era tersebut, kerajaan Sulu, Maguindanao, dan Buayan bersatu dalam sebuah federasi yang dikenal sebagai “Pat-a-pangampong-ku-Ranao,” yang menandakan wilayah Muslim yang berdaulat dan otonom (Salamat, 2001: 63). Syariah Islam menjadi dasar hukum yang diterapkan di kerajaan Islam tersebut. Selain itu,

perdagangan, kesusastraan, dan peradaban tumbuh dengan sangat cepat di kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara.

Di abad ke-16 atau 1521, kedatangan Bangsa Spanyol mengubah politik dan budaya di wilayah tersebut, terutama di P. Luzon. Untuk mencegah penyebaran Islam ke utara Kalimantan, kaum kolonialis berusaha mendirikan koloni dan menganut agama Kristen (Majul, 1989: 10). Hal tersebut ditunjukkan ketika Rajah Sulaiman dari Luzon, yang melindungi Kota Manila bersama para pengikutnya, dipaksa untuk memeluk agama Katolik. Melalui kombinasi kekuatan dan bujukan, Spanyol berhasil membangun otoritasnya di seluruh Filipina, kecuali tiga wilayah: kesultanan Sulu, Maguindanao, dan Buayan (Budiwanti, 2017: 53).

Dibandingkan dengan daerah lain, komunitas di Buayan, Sulu, dan Maguindanao lebih bersatu secara politik. Tanggapan masyarakat Mindanao terhadap kolonialisme Spanyol sangat beragam. Sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Islam yang dipraktikkan di Mindanao telah mengembangkan struktur sosial dan politik yang lebih maju di antara masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat di Filipina Utara (George, 1980: 53). Sistem ini dapat membangun ideologi perlawanan dan menumbuhkan kesadaran untuk bersatu untuk melawan agresi kaum kolonialis. Serangan terhadap wilayah Bangsa Moro didefinisikan sebagai serangan terhadap iman Islam, komunitas,

serta kerajaan, dengan demikian mengaitkan dimensi agama dan politik.

Dengan pergeseran keadaan politik imperialisme di seluruh dunia, Spanyol terpaksa menjual kepulauan Filipina kepada Amerika Serikat. Pada 10 Desember 1898, Traktat Paris mencakup Mindanao. Spanyol mengatakan Kepulauan Mindanao adalah wilayah kolonial yang dibeli Mexico 20 juta dolar. Moros percaya bahwa menyerahkan wilayah Spanyol ke Filipina adalah sesuatu yang tidak moral dan melanggar hukum karena Spanyol tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan wilayah ini ke Amerika Serikat. Kepulauan Mindanao yang dijual adalah wilayah yang dihuni oleh orang Muslim dan tidak pernah dikuasai oleh Spanyol. Selain itu, sebelum wilayahnya diserahkan ke Amerika Serikat, masyarakat Moro tidak pernah diminta pendapat atau dikonsultasikan (Budiwanti, 2003: 54).

Sebagai hasil dari kesepakatan ini, Provinsi Moro didirikan pada tanggal 1 Juni 1903 dan berfungsi sebagai pemerintahan yang berbeda dari bangsa Filipino. Orang Moro sendiri diberi tugas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengelola beberapa provinsi Moro secara administratif (Alim, 1994). Pemerintah AS mengambil pelajaran dari upaya Spanyol yang gagal menaklukkan Bangsa Moro melalui cara-cara militer. Amerika Serikat tidak menggunakan strategi militer untuk mendapatkan simpati publik, tetapi lebih menekankan

pada politik atraksi. Mereka yang menentang diberi hukuman, dan mereka yang menyerah diberi amnesti (Budiwanti, 2003: 54).

Pemerintah kolonial AS juga pertama kali menerapkan inisiatif perdamaian melalui militer untuk mengasimilasi seluruh Mindanao. Sampai tahun 1914, hal ini menandai salah satu fase konflik yang paling kejam. Namun demikian, pada tahun 1914, Pemerintah AS menghentikan kampanye militer melawan Bangsa Moro dan mengubah kebijakannya menjadi strategi menarik. Pemerintah kolonial mulai melakukan tindakan akomodasi terhadap organisasi anti-kolonial. Masyarakat umum sering kali menjadi sasaran melalui strategi yang dikenal sebagai diplomasi kue dan cokelat. Anak-anak diberikan permen dan cokelat oleh tentara Amerika. Cara ini mendapatkan banyak simpati dari masyarakat dan pemimpin Moro. Hal ini sangat bermanfaat bagi pemerintah kolonial karena membantu memperkuat angkatan bersenjata dan kekuasaan pemerintahannya. Namun, para pemimpin Filipino menentang kebijakan ini dan menuntut kebijakan pemerintah yang mendorong integrasi Moro ke Filipina dan lebih banyak partisipasi Filipino dalam birokrasi kolonial. Tuntutan ini berarti Provinsi Moro dihapus dan hukum Filipina diberlakukan kepada Bangsa Moro pada tanggal 1 September 1914.

Salah satu implikasinya adalah kebijakan penguasa kolonial, yang secara aktif mendorong orang Filipino untuk bermigrasi ke

wilayah Bangsa Moro. Dampak kebijakan ini akan dibahas lebih lanjut di bab represi sosial budaya dan pembagian sumber daya. Bangsa Moro melihat ini sebagai awal dari kebijakan Filipinosasi yang akan membahayakan keberlangsungan komunitas Moro di masa depan. Perjuangan dilakukan melalui parlemen dan bersenjata. Pemimpin Moro ingin Mindanao menjadi negara sendiri. Bangsa Moro tetap tidak puas dengan kebijakan ini ketika Amerika memberikan kemerdekaan pada 4 Juli 1946. Adatu-datu dari ranao telah meminta pemerintah Amerika untuk mengeluarkan tanah mereka dari "Negara Bangsa Filipina". Akibatnya, di mata Bangsa Moro, gerakan separatis muncul karena mereka menganggap pemerintah Filipina sebagai "gubirno na saruwang a taw" atau pemerintahan luar negeri (Salamat, 2001: 63).

2. Diskriminasi Terhadap Identitas Sosial dan Budaya

Selama periode kolonial Spanyol, identitas sosial dan budaya Moro telah dilecehkan. Masyarakat Filipina yang sebagian besar beragama Kristen, berhasil dipengaruhi oleh pemerintah kolonial dengan chauvinisme terhadap Moro dan suku asli lainnya (Alim, 1995). Sebagai contoh, permainan moro-moro, sebuah komponen penting dalam berbagai perayaan budaya dan agama, semakin meyakinkan penduduk yang sudah tertindas untuk mengasosiasikan tindakan-tindakan Kristen dengan kebaikan dan kebaikan, sementara menyamakan Islam dengan kejahatan dan bahaya. Orang-orang Moro dianggap sebagai juramentados, herejas, dan kejam, dan mereka

dihukum di neraka. Hal tersebut diperkuat oleh TJS George yang mengatakan sebagai berikut:

'...Gubernur meminta kepala suku setempat untuk mengingat bahwa doktrin mahoma adalah hukum yang salah dan jahat. Uskup Salazar menyebut Islam sebagai 'api yang membawa penyakit'. Pio Pie Jesuit menggambarkan Muslim sebagai 'bajak laut yang tak tertandingi'. Mengkhianati ketidaktahuan masyarakat dan keyakinan yang ingin mereka hancurkan, pendeta lain menulis pada akhir tahun 1892 bahwa Islam di kalangan 'ras yang biadab dan terbelakang seperti Moro di Mindanao dan Jolo tidak terlalu penting...'

Dalam bukunya “Penguasa Muslim dan Pemberontak: Politik Keseharian dan Separatisme Bersenjata di Filipina Selatan,” Prof. Kenna mengeksplorasi perbedaan budaya antara Bangsa Moro dan Filipina, yang diyakini mendasari konflik antara kedua kelompok etnis ini (Mckenna, 1998). Prof. Thomas Mc. Kenna menyatakan bahwa terlepas dari perbedaan budaya, konflik antara masyarakat dan pemerintah Filipina tidak muncul secara langsung dari perbedaan ini, tetapi lebih dari kecenderungan untuk melihat Muslim sebagai terbelakang dan tidak dapat dipercaya karena perlawanan mereka terhadap penjajahan Spanyol. Sebaliknya, umat Islam sering kali menyimpan kekhawatiran terhadap pemerintah dan bangsa Filipina yang mayoritas beragama Kristen. Prasangka timbal balik ini tetap

tidak terselesaikan dan akhirnya meningkat menjadi perang beberapa dekade kemudian.

Setelah pembentukan pemerintah persemakmuran Filipina pada tahun 1935, para pemimpin baru di Manila memiliki asumsi bahwa semua kelompok masyarakat akan bersatu dan berkolaborasi di bawah kepemimpinan nasional, yang menyebabkan perbedaan prasangka semakin meningkat. Para pemimpin tidak memperhatikan perselisihan dan perbedaan di dalam masyarakat, terutama perselisihan antara kelompok etnis Muslim dan Kristen. Namun, pemerintah persemakmuran menggunakan pemikiran kolonial bahwa bangsa non-Kristen dapat menyesuaikan diri dengan doktrinisasi atau pembaratan. Salah satu contohnya adalah ketika presiden pertama persemakmuran Manuel Quezon menyatakan bahwa hukum nasional akan berlaku secara universal untuk semua segmen masyarakat, termasuk orang Kristen dan Muslim, dan bahwa sultan-sultan dan datu-datu tidak ada tempatnya. Umat Islam menanggapi dengan sangat keras. Syariah telah menciptakan sistem politik, hukum, dan sosial budaya unik bagi masyarakat Islam. Pemimpin dan komunitas Islam menyukai sikap Manuel Quezon tersebut. Kaum Muslim sangat tidak menyukai sistem pendidikan Barat modern yang diperkenalkan oleh Spanyol dan Amerika (Majul, 1989: 18-19).

3. Distribusi Sumber Daya di Mindanao

Selama pemerintahan kolonial Amerika Serikat, ada pembagian sumber daya yang tidak adil antara masyarakat Moro dan Filipino. Setelah mengambil alih seluruh Mindanao, Amerika Serikat menetapkan wilayah tersebut sebagai tanah publik. Ini mencakup wilayah yang telah dihuni oleh orang Moro sejak lama. Selain itu, pemerintah kolonial dengan cepat menerapkan kebijakan-kebijakan seperti tata kelola penguasaan wilayah, migrasi yang dipaksakan, dan sistem pendidikan yang mengadopsi model Barat. Melalui inisiatif relokasi wajib, orang-orang dari wilayah utara dan tengah Filipina dipaksa untuk pindah ke wilayah selatan melalui kebijakan migrasi paksa. Pemerintah memberikan pinjaman lunak untuk memfasilitasi migrasi ke Mindanao bagi mereka yang tidak memiliki modal. Bahkan pada tahun 1902, pemerintah kolonial menetapkan Undang-Undang Registrasi Pemilikan Tanah untuk menentukan berapa banyak tanah yang dapat dimiliki setiap orang. Tanah yang diberikan kepada setiap orang Moro sebelum pemerintahan Persemakmuran seluas 16 hektar, namun UU No. 141 yang diberlakukan pada masa persemakmuran mengurangnya menjadi 4 hektar. Pergeseran ini merusak prinsip multikulturalisme dengan mengutamakan pendatang yang memiliki peluang kepemilikan tanah yang lebih besar daripada masyarakat adat, yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama (Tan, 1995).

Kebijakan migrasi ditingkatkan secara signifikan setelah pembentukan pemerintahan persemakmuran. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi sengketa tanah di provinsi tengah Pulau Luzon dan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah padat penduduk. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan melawan inisiatif kolonial Jepang. Setelah itu, pemerintah persemakmuran merelokasi banyak orang Kristen ke daerah yang lebih sedikit penduduknya sambil tetap menjaga hak-hak umat Islam. Pemerintah mulai membangun infrastruktur dan mempercepat proses kepemilikan tanah. Ini memicu konflik etnik berikutnya. Kebijakan ini memiliki konsekuensi yang dapat menggeser status Bangsa Moro dari kelompok etnis mayoritas di Mindanao menjadi minoritas (Majul, 1989: 19-20).

Kebijaksanaan migrasi telah mengubah demografi penduduk Kepulauan Mindanao secara signifikan selama lima puluh tahun. Pada tahun 1918, umat Kristen berjumlah 22% dari total populasi, tetapi naik menjadi 75% pada tahun 1970 dan 65% pada tahun 1980. Di antara 13 Provinsi yang meliputi pulau Mindanao, Sulu, dan Palawan, hanya lima provinsi yang paling miskin, - Sulu, Tawi-tawi, Basilan, Cotabato, dan Lanao del Sur, memiliki mayoritas penduduk Muslim atau Moro. Di provinsi lain, mayoritas penduduk beragama Kristen, yang terdiri dari etnis Filipina. Selama pemungutan suara yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk membentuk ARMM oleh

pemerintah Filipina, hanya lima provinsi Mindanao, Sulu, dan Palawan yang mendukung, sementara provinsi lainnya menentang. Kepulauan Mindanao, Sulu, dan Palawan saat ini dihuni oleh Kristen, Muslim, dan Lumads (Budiwanti, 2003: 61).

Ketidakmerataan dalam pembagian kepemilikan tanah disebabkan oleh perubahan komposisi penduduk. Dimulai dengan perbedaan pendapat mengenai kepemilikan tanah, dimana pemerintah mendukung sistem modern sementara Muslim dan Lumad menganut praktik-praktik tradisional. Di bawah sistem tradisional, kepemilikan tanah bersifat komunal, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memanfaatkan sumber daya dan mata pencaharian berdasarkan hubungan mereka dengan tanah tersebut (Tan, 1995).

Ekonomi Moro semakin sulit. Kelompok termiskin di Mindanao terdiri dari mereka. Mayoritas dari mereka terlibat dalam pertanian dan perikanan skala kecil. Petani Moro, seperti petani miskin di lain Asia, menghadapi tekanan kapitalisasi industri pertanian kontemporer, tingkat produktivitas yang minim, dan kemahiran teknologi yang tidak memadai. Pemerintah Filipina tidak serius memperhatikan cara memperbaiki nasib mereka. Mereka juga tidak pernah menerima subsidi pertanian. Nasib nelayan kecil juga sama. Mereka tidak dapat bersaing dengan nelayan-nelayan yang menggunakan kapal-kapal besar dan teknologi canggih dari Jepang dan Taiwan. Sebagian besar petani Moro modern bekerja untuk keluarga

Kristen. Mereka kembali ke tempat mereka tinggal saat panen untuk menuai padi dan menyiapkan benih untuk periode penanaman berikutnya. Sebagian yang lain bekerja sebagai pedagang kaki lima, penarik becak, penjual sayur keliling, kuli pasar, dan pekerjaan lainnya. Meskipun prostitusi dilarang oleh agama, bahkan sebagian dari mereka mulai tertarik untuk melakukannya. Ratusan ribu perempuan lainnya bermigrasi ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah, untuk bekerja sebagai buruh wanita. Banyak dari mereka membawa kisah mengerikan ke rumah. Di daerah pedesaan Mindanao, kekurangan gizi dan pertanian sangat tinggi (Budiwanti, 2003: 64-65).

4. Pembersihan Etnis terhadap Bangsamoro

Walaupun Bangsa Moro telah mengalami tekanan militer sejak kolonial, ini akan membahas represi dan kekerasan paska kolonial. Tindakan represi pada masa kolonial telah dibahas secara utuh dalam bagian sebelumnya. Pasukan keamanan Filipina, yang sering dianggap lebih memihak etnis Filipina, dan faksi Filipina yang sebagian besar beragama Kristen, menindas Bangsa Moro. Penindasan ini pada dasarnya mencerminkan pembersihan etnis, yang melibatkan penghapusan sistematis, marjinalisasi, dan penindasan individu berdasarkan perbedaan warna kulit, etnis, budaya, bahasa, atau agama, dan menyangkal hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dalam kerangka negara-bangsa. Pembersihan etnis yaitu metode fisik atau struktural terhadap individu-individu melalui jalur politik, sosial, dan

ekonomi. Jenis kedua dari kekerasan dikenal sebagai “kekerasan struktural,” yang ditandai dengan penindasan terhadap individu atau komunitas melalui pembentukan sistem sosial yang menindas. Contoh awal dari kekerasan fisik terhadap Bangsa Moro terjadi di Upi saat persiapan pemilihan umum pada bulan November 1971.

Untuk meraih kemenangan dalam pemilihan walikota, Manuel Tronto, seorang mantan perwira polisi, meminta bantuan seorang teman untuk secara paksa menyingkirkan warga Muslim dari kota tersebut. Sebuah organisasi milisi Kristen yang disebut ILAGA merencanakan serangan ini, dan orang Muslim mulai menanggapi dengan membentuk milisi serupa di Cotabato yang disebut sebagai blackskirt dan barracuda. Menurut Cesar Majul, kepentingan politik elit lokal dalam menghadapi Pemilu November 1972 merupakan faktor utama dalam konflik kekerasan yang terjadi. Hal ini karena setiap milisi memberikan kekuasaan kepada unit lokalnya masing-masing. Pada akhir tahun 1970, terjadi pertempuran besar antara ILAGA dan milisi kristen melawan barracuda, blackskirt, dan kelompok anti-muslim bersenjata. Sedikitnya 30.000 orang Islam, Kristen, dan Tiruray mengungsi ke Maguindanao dan Maranao (Majul, 1989: 47).

Rintangannya awal yang dihadapi oleh gerakan separatis termasuk pada pembersihan etnis yang tercantum di antaranya: hampir di seluruh Mindanao konflik dan peperangan antara Islam dan Kristen muncul pada awal tahun 1970-an. Provinsi Filipina yang paling berbahaya

adalah Catabato. Masyarakat Muslim masih di bantai di berbagai kota. Pada bulan juni 1971, komunitas Kristen melakukan pembantaian terbuka pertama kali terhadap umat Islam di Manila, Carmen, Catabato utara. Waktu itu, Carmen hanya dihuni oleh Islam. Undangan yang diberikan kepada para pemimpin Kristen pada tanggal 9 Juni 1971, untuk berbicara tentang perdamaian yaitu awal dari pembantaian. Umat Muslim didesak untuk berkumpul di Masjid, dengan harapan dapat meredakan ketegangan antara Kristen dan Muslim yang meningkat di Mindanao.

Pada akhirnya, bukan percakapan yang terjadi, tetapi milisi Ilaga langsung menembaknya ke arah komunis Muslim. Dalam insiden tersebut, 70 pria, wanita, dan anak-anak Muslim kehilangan nyawa, dengan 17 orang mengalami luka-luka, seperti yang dilaporkan oleh Manila Times. Setidaknya ada 29 wanita dan 13 anak-anak adalah korban insiden tersebut. Surat kabar lain melaporkan, bahwa ada korban anak-anak, bayi berusia 3 bulan yang masih di susui. Milisi tersebut membakar sekolah, seluruh rumah (Majul, 1989: 50-51).

BAB IV

GERAKAN SEPARATIS NUR MISUARI DALAM MEMPERJUANGKAN MINORITAS MUSLIM MORO MENUJU PERDAMAIAN

A. Potret Muslim Moro

Perkataan "Moro" berasal dari kata "Moor", yang merujuk pada sebuah bangsa yang beragama Islam di Spanyol. Spanyol kemudian menggunakan istilah "Moro" untuk orang-orang Mindanao yang selalu menentang pemerintah Spanyol. Bangsa Moro merujuk kepada bangsa yang menduduki tanah Mindanao dan wilayah di Selatan Filipina yang menolak Mindanao menjadi bagian dari Filipina. Bangsa Moro (the Moro people) sebagai nama dari 13 kelompok etnolinguistik Filipina yang termasuk bagian dari penduduk Mindanao dan wilayah selatan Filipina yang terbagi ke dalam kebudayaan yang berbeda dan dialek bahasa yang berbeda. Kelompok utama yang menonjol dari ke-13 kelompok tersebut adalah Maguindanao, Maranao dan Tausug. Mereka merupakan kelompok yang menonjol dalam hal kepemimpinan bangsa Moro dan bersatu mendukung perjuangan bangsa Moro dalam menentukan nasib sendiri (Alim, 1995).

Bahasa Moro memiliki banyak kesamaan, misalnya orang dari kelompok Maguindanao dan Maranan dapat berbicara dan memahami bahasa tersebut. Bahasa dan dialek tertentu yang digunakan di antara umat Islam menunjukkan kemiripan yang lebih besar dengan bahasa yang

digunakan oleh umat Kristen. Misalnya, bahasa-bahasa seperti Samal, Jama Mapun, dan Badjao sangat berbeda dengan Tausug, yang memiliki kemiripan mencolok dengan bahasa Tagalog dan Visay, bahasa yang sebagian besar digunakan oleh umat Kristen. Mayoritas orang Moro hidup sebagai petani dan nelayan. Orang Maguindanao, Maranao, Tausug pedalaman, dan Yakan adalah mayoritas petani. Orang Iranun, Samal, Kalagan, dan Tausug pesisir adalah mayoritas nelayan. Orang-orang Tagalog Islam adalah profesional, karyawan kantor, dan karyawan pabrik (Rosnawati, 2008: 39).

Selain itu, pemerintah Filipina menerapkan berbagai kebijakan ekonomi di Mindanao, seperti mendorong investor asing untuk masuk. Ini menghasilkan lebih banyak proyek industri di sektor agrobisnis yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Jumlah investor dan penanam modal yang datang ke Mindanao untuk menggali sumber tambang semakin meningkatkan perbedaan antara orang Moro dan Kristen. Untuk memenuhi harapan ekspor dan pemasukan devisa Filipina, pemerintah Filipina menarik investor asing untuk membangun bisnis besar di Mindanao. Pola ekonomi Mindanao telah berubah karena berdirinya sejumlah industri besar, yang beralih dari pertanian subsisten ke sektor industri yang berfokus pada ekspor. Hal ini menyebabkan masyarakat Moro yang sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten menjadi masyarakat pinggiran yang termarginalisasi oleh industrialisasi dan menjadi masyarakat pinggiran. Kebijakan pemerintah Filipina yang tidak

menguntungkan ekonomi Moro juga menyebabkan standar hidup mereka menurun (Rosnawati, 2008: 44).

Di Mindanao, perusahaan multinasional memegang kendali dan monopoli ekonomi, terutama dalam ekspor nanas, pisang, gula, dan komoditas lainnya (Tadem, 1980: 34). Industri pisang di Mindanao sendiri meliputi 27.000 hektar yang sepenuhnya berada di bawah kontrol multinasional Amerika Serikat. Tanah seluas 20.000 hektar dimiliki oleh tiga perusahaan Amerika Serikat seperti Dole memiliki 9.000 hektar; Del Monte 6.588 hektar dan Tadeco 4.500 hektar. Del Monte sendiri merupakan pemilik perkebunan nanas terbesar Industri pisang di Mindanao sendiri meliputi 27.000 hektar yang sepenuhnya berada di bawah kontrol multinasional Amerika Serikat. Tanah seluas 20.000 hektar dimiliki oleh tiga perusahaan Amerika Serikat seperti Dole memiliki 9.000 hektar; Del Monte 6.588 hektar dan Tadeco 4.500 hektar. Del Monte sendiri merupakan pemilik perkebunan nanas terbesar Industri pisang di Mindanao sendiri meliputi 27.000 hektar yang sepenuhnya berada di bawah kontrol multinasional Amerika Serikat. Del Monte memiliki perkebunan nanas terbesar di dunia, dengan 36.000 hektar dari tanah total di Mindanao (Ahmad, 1980: 21).

Ketidakpuasan ini menyebabkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan Moro, yang kehilangan otoritas politik, tanah leluhur, dan sumber ekonomi. Ini terjadi dalam beberapa peristiwa kecil dari tahun

1914 hingga 1940 (Gowing, 1979: 164-198). Perlawanan yang sistematis berkembang dari peristiwa kecil ini pada tahun 60-an.

1. Perjuangan Bersenjata MNLF

Di Upi, Cotabato utara, pada tahun 1970, terjadi konflik antara penetap Kristen Ilaga Feliciano Luces, juga dikenal sebagai Toothpick, dan orang Moro. Konflik ini segera menyebar ke bagian lain Cotabato, menyebabkan ketegangan yang kemudian berkembang menjadi konflik berdarah. Kemunculan gerombolan Ilaga diimbangi dengan munculnya pasukan bersenjata muslim yang disebut Blackshirts. Pada akhir tahun 1970, pertempuran antara Ilaga dan Blackshirts di Cotabato menyebabkan kekacauan ekonomi dan evakuasi ribuan orang. Sekitar 30.000 orang muslim, Kristen, dan tirurays terpaksa meninggalkan rumah dan ladang mereka (Gowing, 1979: 193).

Di Barrio Manili, Carmen, Cotabato utara, pada tanggal 19 Juni 1971, Ilaga membunuh 70 orang, termasuk wanita dan anak-anak, di sebuah mesjid. Pada bulan Agustus, terjadi pertempuran di Buldon antara pasukan kepolisian pemerintah Filipina dan Blackshirts. Pada bulan September, serangan Ilaga terjadi di Ampatuan, Cotabato utara. Pemerintah Filipina kemudian mengirimkan tentara untuk memulihkan keadaan dan meletakkan polisi di daerah konflik. Presiden Marcos menggunakan pendekatan "carrot and stick" untuk menangani konflik di Mindanao. Sementara pendekatan "kayu" berarti menggunakan instrumen militer dengan melakukan penekanan-penekanan,

pendekatan "carror" bertujuan untuk menarik banyak pejuang Moro untuk berhenti berjuang. Strategi ini memicu konflik bersenjata dengan MNLF (Rosnawati, 2008: 51-52).

Pada tanggal 21 September 1972, Presiden Marcos menetapkan undang-undang keadaan darurat perang (martial law) yang berada di bawah kendalinya langsung. Undang-undang ini menerapkan pengawasan politik dan pengawasan terhadap media massa, serta ancaman penahanan bagi mereka yang dianggap bekerja sama dengan MNLF. Undang-undang ini juga menghapus hak-hak sipil. Kondisi darurat perang ditetapkan karena kegagalan pemerintah dalam melakukan reformasi, meningkatnya protes mahasiswa, dan gerakan permisahan di kalangan Muslim di wilayah selatan (Majul, 1989: 61). Setelah menyatakan keadaan perang, langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Filipina adalah pengorganisasian semua senjata gelap untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Masyarakat Moro dipengaruhi oleh penerapan undang-undang darurat perang, yang menghalangi harapan mereka untuk berperang bersenjata untuk mendapatkan kemerdekaan.

MNLF melihat pelaksanaan undang-undang darurat perang sebagai penindasan terhadap keinginan kebebasan orang Moro. Pelaksanaan undang-undang Narurat perang mempercepat kesadaran revolusioner baru di kalangan orang Moro. Akibatnya, MNLF muncul sebagai

organisasi yang menonjol dalam perjuangan untuk kemerdekaan Mindanao.

Semua kampus Universitas Negara Bagian Mindanao di kota Marawi diambil alih oleh seorang ulama bernama Iklas pada bulan Oktober 1972. Mereka menggunakan stasiun radio kampus untuk mencari dukungan luas untuk perjuangan jihad melawan pemerintah Filipina. Pusat-pusat kekuatan militer diserang, termasuk Camp Keithly di kota Marawi. Kepemimpinan MNLF di Lanao del Sur campur tangan setelah pemberontakan Iklas, yang memulai partisipasi tokoh-tokoh religius dalam perjuangan Moro.

Untuk mengurangi konflik, Marcos mengirimkan ekspedisi ke Filipina Selatan pada bulan Nopember 1972. Kehadiran militer pemerintah Filipina di wilayah muslim tersebut dianggap memulai perang melawan orang Moro. MNLF/BMA merencanakan dan melakukan gerakan agresif untuk melawan pasukan militer pemerintah Filipina (AFP). Di barat daya Mindanao, Basilan, propinsi Cotabato, seluruh wilayah Lanao, semenanjung Zamboanga, dan Tawi-tawi, pemberontakan Moro menyebar. Kondisi ini menyebabkan konflik berdarah antara MNLF/BMA dan AFP. Orang-orang sipil di Selatan Filipina terbagi menjadi kelompok agama, media massa, dan alat pembantu pemerintah. MNLF memanfaatkan dukungan masyarakat Moro sebagai perwakilan etnik Moro di Kepulauan Mindanao dan memanfaatkan penderitaan dan kesulitan orang Moro untuk

mendorong dukungan internasional untuk perjuangannya. Strategi dukungan massa MNLF dilakukan dengan memanfaatkan kesalahan pemerintah Filipina dengan keadaan ekonomi dan politik Mindanao yang semakin memburuk. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik di Mindanao ditambah dengan intervensi militer yang meningkat dari pemerintah Filipina membuat keadaan di Mindanao semakin tidak stabil. MNLF menggunakan situasi ini untuk menawarkan alternatif bagi bagian masyarakat Filipina yang telah dikecewakan oleh kebijakan pemerintah. Semakin banyak anggota masyarakat yang mendukung perjuangan MNLF, semakin kuat dukungan massa (Rosnawati, 2008: 54-55).

2. Perjuangan Politik

Strategi dukungan massa MNLF dilakukan dengan memanfaatkan kesalahan pemerintah Filipina dan keadaan ekonomi dan politik Mindanao yang semakin memburuk. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik di Mindanao ditambah dengan intervensi militer yang meningkat dari pemerintah Filipina membuat keadaan di Mindanao semakin tidak stabil. MNLF menggunakan situasi ini untuk menawarkan alternatif bagi bagian masyarakat Filipina yang telah dikecewakan oleh kebijakan pemerintah. Semakin banyak anggota masyarakat yang mendukung

perjuangan MNLF, semakin kuat dukungan massa (Perwita, 2007: 112).

Sebuah pertemuan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1974. Untuk pertama kalinya sejak Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyebut MNLF dalam resolusinya, pertemuan tersebut secara resmi mengakui MNLF sebagai perwakilan Muslim Moro. Malaysia juga mendesak pemerintah Filipina untuk menemukan "sebuah pemecahan masalah secara politik melalui negosiasi dengan pemimpin muslim Moro, khususnya dengan perwakilan MNLF."

Mencari dukungan politik dari OKI adalah tujuan MNLF untuk secara resmi menginternasionalisasikan perjuangan politiknya. Dalam berbagai cara, anggota OKI menanggapi upaya MNLF. Berbeda dengan Indonesia, Libya mendukung perjuangan MNLF melalui bantuan ekonomi dan memberikan latihan militer dan peralatan kepada pasukan Moro. Didasarkan pada prinsip tidak ikut campur (non-interference) dalam urusan domestik negara lain dan menjaga solidaritas ASEAN, perspektif Indonesia ini berkembang. Dalam Konferensi OKI, Indonesia mendesak penyelesaian konflik MNLF demi integritas wilayah dan kedaulatan Filipina. Dalam tahun 1979, terjadi konflik internal dalam MNLF. Konflik ini terjadi karena alasan politik, termasuk perbedaan ideologi dan ketidaksetujuan beberapa anggota MNLF tentang pendirian MNLF tentang menerima otonomi dari pemerintah Filipina. Setelah itu, MNLF pecah menjadi faksi Nur

Misuari, Bangsa Moro Liberation Organization (BMLO), dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), yang diketuai oleh Salamat Hashim. Perpecahan dalam tubuh MNLF melemahkan dan memperburuk posisi MNLF di hadapan pemerintah Filipina. Mesir dan Libya mendukung MILF dan faksi Nur Misuari dari MNLF. Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Muslim ke-9 di Dakar pada bulan April 1978, OKI hanya mengakui MNLF faksi Nur Misuari sebagai pemimpin dan juru bicara atas masalah Moro. Namun, karena konflik internal dan tekanan internasional, MNLF dapat membangun kembali kekuatan untuk menyusun perjuangannya. Selama awal tahun 1980, upaya untuk menyelesaikan masalah bangsa Moro secara menyeluruh tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri ke-11 di Islamabad menetapkan bahwa anggota OKI akan melakukan tekanan ekonomi, sosial, dan politik terhadap pemerintah Filipina untuk mendorong pelaksanaan Perjanjian Tripoli. Dengan penegasan ini, MNLF memiliki kekuatan moral dan politik untuk berjuang dalam politik internasional (Rosnawati, 2008: 56-57).

B. Upaya Dalam Menuju Perdamaian

Perjuangan bersenjata Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) melawan Pemerintah Filipina menjadi isu internasional pada tahun 1972 ketika Konferensi Menteri Luar Negeri Islam Ketiga (ICFM) yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, mengadopsi resolusi bertajuk "Kondisi Umat Islam di orang Filipina." Dalam komunike terakhirnya,

Organisasi Negara-negara Islam (OKI) menyatakan keprihatinannya atas penderitaan umat Islam yang tinggal di Filipina. Dalam konferensi Kuala Lumpur tahun 1974, OKI mengadopsi Resolusi 18 yang meminta pemerintah Filipina untuk bertemu dengan perwakilan MNLF di Jeddah, Arab Saudi, untuk mencapai solusi yang adil terhadap masalah umat Islam. Resolusi tersebut menekankan pengakuan OKI bahwa perang di Mindanao adalah masalah internal Filipina (Pramoto, 1990: 84).

Perang dengan MNLF saat itu (1974) telah memakan korban sekitar 120.000 orang. hidup dan membuat sekitar 300.000 orang lagi mengungsi dan menginginkan solusi atas masalah tersebut memiliki perdamaian di negaranya, Presiden Marcos mempertimbangkan usulan tersebut OKI. Dalam pertukaran rahasia antara Marcos dan penasihat seniornya, pemerintah mengakui bahwa mereka tidak dapat menangani MNLF tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pendukung kuat di Timur Tengah. Negara ini sangat bergantung pada minyaknya ekspor dari negara-negara Timur Tengah, merasa bijaksana secara politik dan ekonomi untuk tidak melakukan hal tersebut memutuskan hubungan dengan negara-negara tersebut dengan tidak mengindahkan rekomendasi OKI tentang cara melakukannya menyelesaikan masalah. Maka pada bulan Januari 1974, Marcos mengirimkan tim diplomatnya ke Timur Tengah untuk mengesankan para pendukung MNLF di sana atas ketulusan pemerintahnya dalam melelahkan semua cara damai untuk segera membawa perdamaian bagi komunitas Muslim di Mindanao. Marcos

mengirim sekretaris eksekutifnya Melchor, seorang diplomat yang terampil, untuk memimpin misi tersebut Timur Tengah. Setelah perjalanan pertama Melchor, pada 14-20 Januari 1975, dia melapor ke Marcos bahwa hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah bergantung pada penyelesaian MNLF dan bahwa MNLF tidak bertindak sendiri namun berada di bawah pengaruhnya pendukung utama dari OKI (Vitug & Gloria, 2000: 31).

Pada akhir perundingan tanggal 23 Desember 1976, Perjanjian Tripoli dengan empat ketentuan utama ditandatangani. Pertama ketentuan menyerukan pembentukan otonomi di Filipina Selatan dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas teritorial Republik Filipina. Ketentuan selanjutnya, menyebutkan provinsi-provinsi yang dicacah di Mindanao yang akan dicakup Daerah Otonomi. Ketentuan ketiga menguraikan dan mendefinisikan prinsip-prinsip substantif untuk pembentukan otonomi dan gencatan senjata di daerah-daerah tertentu di Mindanao untuk dimulai tepat setelah penandatanganan dan empat paragraf lainnya yang menyatakan prosedur untuk akhirnya mencapai atau menerapkan otonomi. Perjanjian tersebut menekankan bahwa itu pelaksanaannya berada dalam wilayah kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Filipina. Apalagi implementasi perjanjian itu sesuai dengan proses ketatanegaraan Republik (Dumia, 1991: 130).

Penandatungannya adalah Wakil Menteri Barbero dan Ketua Misuari Pemerintah Filipina dan MNLF masing-masing. Bagi pemerintah

Filipina penandatanganan perjanjian ini merupakan salah satu langkah solid menuju pencapaian perdamaian di Mindanao, mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Di sisi lain, Ketua Misuari tidak begitu baik senang atas penandatanganan itu karena dia percaya bahwa formula otonomi adalah kompromi adalah sebuah penyimpangan total dari pendirian awal negara yang terpisah dan merdeka umat Islam di Mindanao. Tekanan OKI terhadap Misuari untuk berdamai dengan hal tersebut Pemerintah Filipina memaksanya untuk menandatangani perjanjian tersebut (Pangarungan, 1985: 133).

Setelah penandatanganan perjanjian, pertemuan lain dijadwalkan untuk belajar merinci poin-poin yang tersisa untuk didiskusikan dalam mencapai solusi yang dapat mengimplementasikan ketentuan perjanjian. Sekali lagi dalam pertemuan ini Misuari dan anggota panelnya kembali ke posisi semula yang menuntut pembentukan Islam yang terpisah pemerintahan di Mindanao dengan bendera, lambang, dan tentara tetap yang terpisah setara dengan 25 persen dari total kekuatan Angkatan Bersenjata Filipina. Itu tuntutan MNLF melanggar konstitusi Filipina dan Perjanjian Tripoli itu sendiri oleh karena itu tidak dapat diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, pertemuan tersebut gagal menentukan rincian pelaksanaan perjanjian dan penolakan MNLF untuk mempertimbangkan kembali tuntutan, implementasi perjanjian Tripoli gagal dan gagal ditakdirkan (Vitug & Gloria, 2000: 33).

Namun Presiden Marcos masih ingin mencari cara untuk menyelamatkan perjanjian tersebut, mengeluarkan proklamasi presiden pembentukan Otonomi Daerah di wilayah selatan Filipina melaksanakan ketentuan pertama Perjanjian Tripoli. Dia juga segera mulai membentuk pemerintahan sementara, menawarkan mayoritas keanggotaan MNLF dan kepemimpinan Misuari. Namun Misuari tidak melakukannya menanggapi dan sebagai hasilnya, gubernur petahana di tiga belas provinsi diangkat anggota pemerintahan sementara. Untuk melaksanakan ketentuan kedua, referendum-plebisit dijadwalkan pada 17 April 1977. Referendum tersebut untuk menanyakan pemilih untuk memilih sistem administrasi daerah otonom yang dikuasai atau dikendalikan oleh MNLF dengan otoritas penuh dan lengkap (Dumia, 1991: 151-154).

Hanya sembilan dari tiga belas provinsi yang mengikuti referendum dan jumlahnya sangat banyak margin pemilih juga memberikan suara menentang pembentukan unit otonom tunggal memberikan MNLF kendali penuh atas wilayah otonom, namun mereka memilih untuk melakukan hal tersebut tetap berada di daerahnya masing-masing dan dipimpin oleh daerah yang dipilihnya dan pejabat provinsi. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Zamboanga tetap berada di Wilayah 9; Cotabato Utara, Maguindanao, Sultan Kudarat, dan Lanao di Wilayah 12; Palawan di Wilayah 4; dan Cotabato Selatan dan Davao del Sur di Wilayah 11. MNLF menolaknya menghormati perilaku dan hasil

referendum dan melanjutkan tuntutananya dan permusuhan terhadap pemerintah untuk negara Islam terpisah di Mindanao (Dumia, 1991: 156).

Ketika Corazon Aquino mengambil alih jabatan Presiden dari Marcos setelah pemberontakan rakyat pada bulan Februari 1986, salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah memulihkan demokrasi lembaga-lembaga di pemerintahan dan mengupayakan program rekonsiliasi nasional. Sebagai akibat negosiasi antara MNLF dan pemerintah dimulai lagi dan Tripoli tahun 1976 Kesepakatan digunakan sebagai titik awal (Steinberg, 1982: 175).

Akhirnya pada bulan Januari 1987, setelah beberapa pertemuan, MNLF dan pemerintah mencapai gencatan senjata. MNLF melepaskan tujuannya untuk mencapai tujuan kemerdekaan bagi wilayah Muslim dan menerima tawaran otonomi dari pemerintah. Oleh kali ini, kelompok oposisi Muslim semakin terpecah, dan yang tersisa hanyalah MNLF (mewakili sekitar 20.000 anggota) menyetujui persyaratan perdamaian. Sementara itu, itu pemerintah juga berupaya menjalin hubungan dengan kelompok sempalan MNLF. Namun pada awal tahun 1987, pasukan MILF melancarkan serangan terhadap pemerintah pasukan dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh negosiasi dan diakui secara internasional (Harber, 1998: 55).

Konstitusi Filipina yang baru tahun 1987 pada akhirnya menghormati Tripoli Perjanjian, dan disediakan untuk daerah otonom di wilayah Muslim Mindanao. Pada akhir tahun 1987, Aquino membentuk

Komisi Permusyawaratan Regional Consultative Commission (RCC) dalam upaya menjaga dialog antara pemerintah dan kelompok pemberontak dalam persiapan menghadapi undang-undang otonomi yang diamanatkan secara konstitusional untuk Mindanao. Meskipun terciptanya RCC sekalipun, sebagian besar dialog antara pemerintah dan MNLF terus berlanjut di RCC menjadi urusan satu lawan satu (Luga, 1981: 68).

Kekerasan pada tahun 1988 dan 1989 di Mindanao terus berlanjut secara sporadis akibat perpecahan sejalan dengan garis etnis dan personalistik gerakan separatis Muslim. Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan Aquino menyetujui Undang-undang Republik 6734 yang menetapkan Otonomi Wilayah Muslim Mindanao (ARMM) sebagai tanggapan terhadap tuntutan pemberontak Muslim otonomi. Wilayah Mindanao dan Sulu yang terkena dampak diberi hak untuk menghindari keanggotaan di ARMM jika mereka memberikan suara dalam pemungutan suara. Sebab sebagian besar provinsi sudah memilikinya mayoritas penduduknya beragama Kristen, hanya empat dari tiga belas provinsi yang memilih otonomi Plebisit November 1989 (dua di Mindanao dan dua di Sulu). Banyak umat Islam yang seperti itu tidak puas dengan perjanjian tersebut, merasa terlalu banyak yang dikompromikan, dan memboikot perjanjian tersebut Memilih. Dengan kesepakatan di tangan dan kesediaan pemerintah untuk melakukannya perjanjian kehormatan, saingan utama Misuari bukan lagi birokrasi pemerintah, melainkan justru MILF-lah yang memisahkan diri dan kepemimpinannya. MILF tetap bertahan menentang

perjanjian pemerintah-MNLF, dan kekerasan sporadis terus berlanjut faksi saingan, klan keluarga, dan kekuatan pemerintah. Pemilihan pejabat ARMM yang pertama diadakan pada tanggal 17 Februari 1990, dan yang baru badan politik-administrasi ARMM secara resmi dilantik pada November 1990. Mantan penasihat hukum MNLF, Zacarias Candao, terpilih menjadi gubernur menang atas Ali Dimaporo. Fungsi departemen pekerjaan umum, tenaga kerja dan pekerjaan, pemerintahan daerah, pelayanan sosial, dll, dialihkan ke Candao dan pemerintahan daerah otonomnya. Pemerintah memberi wewenang kepada ARMM untuk memulai dan mendorong investasi asing langsung untuk pertumbuhan dan pembangunan, namun kurangnya Moro persatuan dan komitmen terhadap tujuan bersama mencegah ARMM menjadi badan gubernur yang berfungsi dan sah (Harber, 1998: 57-58).

Pada pemilu bulan Maret 1996, para ahli strategi pemerintah mencoba meyakinkan Misuari untuk melakukan hal tersebut mencalonkan diri sebagai gubernur ARMM dan, meskipun ada keberatan dari kelompok garis keras MNLF, Misuari mengajukan tuntutannya pencalonan dan akhirnya menang. Strategi pemerintah saat itu adalah hal itu akan terjadi lebih mudah untuk membicarakan perdamaian dengan MNLF sekarang karena mereka secara praktis menjalankan ARMM sampai saat itu, MNLF tidak pernah mengakui ARMM. MNLF berebut posisi di pemerintahan ARMM dan Misuari menunjuk pejabat secara sewenang-wenang dengan

lebih banyak dari 50 persen jabatan kabinet yang tersedia diberikan kepada anggota MNLF (Vitug & Gloria, 2000: 80).

C. Perjanjian Tripoli 1976

Marcos mengirimkan perwakilannya ke Jeddah untuk melakukan perundingan awal yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemerintah mengajak gerakan separatis Moro yang dipimpin Nur Misuari untuk melakukan perundingan, dengan syarat perundingan dilakukan di luar wilayah Filipina. Nur Misuari didelegasikan ke Jeddah, Arab Saudi. Selain itu, negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, mengusulkan resolusi alternatif untuk masalah Moro. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa konflik seperti masalah Moro dapat diatasi dengan menumbuhkan saling pengertian di antara orang-orang dengan latar belakang agama dan aliran yang beragam (Syeingerg, 1987:28).

Namun, kaum Muslim Filipina menganggap gerakan separatis Moro sebagai masalah prinsipil, yang berarti pemecahannya harus dilakukan secara prinsipil. Akibatnya, pergoalakan gerakan tersebut tidak cukup dianggap sebagai pemberontakan (Sudiby, 1978: 286). Itulah sebabnya Organisasi Konferensi Islam mendorong pemerintah di Manila untuk mengakui hak-hak minoritas Islam di Filipina.

Setelah berbagai upaya, pemerintah Manila akhirnya setuju untuk bertemu dengan Nur Misuari di Jeddah. Pada tanggal 16 Januari 1975, negosiasi diadakan antara pemerintah dan para pendukung Moro, yang

juga disebut sebagai MNLF (Moro Nationalist Liberation Front), di Jeddah. Perundingan tersebut akhirnya gagal karena MNLF bersikeras untuk mendirikan negara otonom dengan kekuatan militernya sendiri. Aljendro Melchor Jr. memimpin delegasi pemerintah Filipina pada periode ini (Sudibyo, 1978: 287). Marcos berpegang teguh pada prinsip bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara, yang membuatnya melakukan tindakan kekerasan tanpa ragu-ragu.

Banyak tentara menyerah, serangan gerilyawan Muslim tidak berhenti, dan bahkan semakin intensif yang mengakibatkan meningkatnya jumlah korban baik dari pihak pemerintah maupun pasukan Muslim. Pada 9 Maret 1976, pertempuran besar terjadi di propinsi Lanao Sur (Syeinberg, 1987:396).

Kekerasan bersenjata diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Tripoli pada tanggal 23 Desember 1976. Fakta yang mengikat ini disahkan oleh Carmelo Z. Barbero, yang mewakili pemerintah Filipina di bawah Presiden Marcos, dan pemimpin MNLF Nur Misuari. Pada dasarnya, perjanjian ini memberikan otonomi kepada umat Islam di Filipina Selatan dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas Republik Filipina. Perjanjian Tripoli terdiri dari berbagai komponen secara keseluruhan. Pertama, disebutkan bahwa wilayah akan menjadi bagian dari otonomi Filipina Selatan. Kedaulatan negara dan integritas wilayah Republik Filipina. Selanjutnya, wilayah Muslim otonom di Filipina selatan terdiri dari tiga belas provinsi: Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del

Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato Utara, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Sur, Cotabato Selatan, dan Palawan. Jumlahnya setara dengan sepertiga dari seluruh wilayah Filipina (Wiharyanto, 2014: 9).

Tidak hanya memperoleh bantuan finansial dan material dari negara-negara Islam, MNLF berhasil menginternasionalisasikan gerakannya dan konfliknya dengan GRP. Mereka juga berhasil menginternasionalisasikan konfliknya dengan GRP melalui kampanye untuk meminta dukungan politik dan pengakuan diplomatik atas Republik Bangsa Moro. Imelda R. Marcos berangkat ke Tripoli, Lybia, di akhir 1976 untuk berunding dengan Kolonel Khadafi untuk menyelesaikan masalah Muslim Moro di Filipina Selatan. Setelah kunjungan Imelda, kelompok yang mewakili pemerintah Filipina bernegosiasi dengan wakil MNLF di Tripoli dibentuk. Pada akhirnya, perselisihan kedua belah pihak ini menghasilkan Perjanjian Tripoli pada tanggal 23 Desember 1976. Dengan difasilitasi oleh OKI, GRP dan MNLF menandatangani Perjanjian ini. Dalam perjanjian ini, mereka menyetujui gencatan senjata dan memberikan otonomi kepada tiga belas provinsi dan sembilan kota di Filipina Selatan. Perjanjian ini tampaknya menjadi solusi yang adil untuk menyelesaikan masalah Moro karena memberikan hak untuk "memerintah sendiri (self rule atau home rule) di atas wilayah (tanah air) sendiri. Perjanjian Tripoli menandai negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan para pejuang nasionalist Moro (MNLF). Kontak senjata

antara MNLF dan AFP terjadi dari 1973 hingga 1975, yang menyebabkan banyak luka dan korban jiwa. Akibatnya, OIC mendorong pemerintah Filipina untuk segera melakukan perdamaian. Oleh karena itu, lobi Misuari berhasil bukan hanya dengan mendapatkan bantuan keuangan dan material (persenjataan dan latihan militer) dari negara-negara Islam, tetapi juga dengan upaya OIC untuk mendukung perdamaian antara MNLF dan GRP. Dukungan OIC bagi MNLF terbukti dengan tekanan pada pemerintah Filipina untuk menjamin otonomi penuh dan berarti bagi rakyat Moro (Quimpo, 2000: 103-104).

Pada bulan Agustus 1989, Aquino menandatangani undang-undang yang menetapkan wilayah autonomi Muslim Mindanao, juga dikenal sebagai ARMM. Dalam pemungutan suara (referendum) yang diadakan pada bulan Nopember, hanya 5 propinsi dari 13 propinsi yang ingin dimasukkan ke dalam ARMM diterima, menurut Aquino. Ini karena di kelima propinsi tersebut ada mayoritas muslim, sedangkan di delapan propinsi lainnya mayoritas penduduk Kristen Filipino. Selama pemerintahan Aquino, penjanjian gencatan senjata dilanggar secara sistematis, seperti yang ditunjukkan oleh konflik bersenjata yang sering terjadi antara militer pemerintah Filipina dan MILF, sebuah cabang dari MNLF. Posisi Aquino di angkatan bersenjata Filipina juga sangat lemah, yang menyebabkan beberapa upaya kudeta untuk menggulingkannya. Salah satu faktor yang menghambat proses perundingan antara MNLF dan

pemerintah Filipina adalah pergeseran posisi Aquino (Rosnawati, 2008: 77).

D. Perjanjian Damai (Peace Agreement) 1996

Perjanjian damai yang ditandatangani pada September 1996 oleh GRP dan MNLF dimaksudkan untuk berfungsi sebagai perjanjian terakhir untuk melaksanakan syarat-syarat Perjanjian Tripoli 1976. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tripoli, pemberian otonomi dilengkapi dengan sistem administrasi, badan eksekutif dan legislatif, dan satuan pertahanan regional. Dalam perjanjian tersebut, MNLF menerima ARMM, yang terdiri dari lima provinsi. Namun, Perjanjian Damai 1996 memperpanjang masa transisi tiga tahun, memberikan MNLF kesempatan untuk menjalankan struktur transisi dari otonomi. Dengan demikian, MNLF memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam pemerintahan dan meyakinkan orang-orang di setiap provinsi dan kota untuk mendukung otonomi. Selama periode ini, semua anggota MNLF dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata dan kepolisian Filipina. Ramos membuat kebijakan akomodasi dan kooptasi kekuatan MNLF dengan memberikan kesempatan kerja kepada bekas gerilyawan MNLF, bersama dengan keluarga mereka, untuk bergabung dengan angkatan bersenjata dan kepolisian Filipina (Budiwanti, 2003: 108).

Pada bulan September 1996, Presiden Ramos dan Nur Misuari, pemimpin MNLF, menandatangani Perjanjian Damai 1996. Ini adalah pengembangan dari Perjanjian Tripoli 1976, yang menghasilkan beberapa

hal: pertama, promosi proyek-proyek pembangunan ekonomi di seluruh provinsi akan dipromosikan selama tiga tahun; kedua, Dewan Filipina Selatan untuk Perdamaian dan Pembangunan—juga dikenal sebagai Southern Philippine Council for Peace and Development—dan ketiga, Misuari Keempat, 7.500 anggota MNLF dimasukkan ke dalam Angkatan bersenjata dan Kepolisian Filipina. "we are one final step away from an agreement that would guarantee an endring peace in Mindanao," kata pemerintah Filipina dan MNLF (Rosnawati, 2008: 76).

Perjanjian damai 1996 diharapkan dapat menyelesaikan konflik bersenjata antara GRP dan MNLF ini adalah manifestasi dari perjanjian Tripoli 1976 yang berlangsung selama 24 tahun dan mengakibatkan lebih dari 120.000 korban jiwa, dengan puluhan ribu luka-luka dan lebih dari satu juta orang kehilangan rumah dan tanah mereka. Perjanjian perdamaian tahun 1996 juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik bersenjata dengan kelompok pembebasan Moro lainnya, MNLF dan Abu Sayyaf. Pada akhirnya, itu akan meletakkan dasar untuk perdamaian abadi di ketiga belas provinsi dan 9 kota dengan berdasarkan prinsip otonomi yang adil (Budiwanti, 2003: 109).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari fenomena tersebut, pada bagian akhir skripsi. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa isi keseluruhan dari penelitian ini yang berjudul “Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme Nur Misuari di Filipina Selatan (1972-1996).” Di antaranya sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya gerakan separatisme Moro National Liberation Front (MNLF) adalah bahwa gerakan ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap marginalisasi, ketidakadilan, dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Muslim Moro di Filipina selatan, terutama di wilayah Mindanao. Sejak kolonialisme Spanyol dan Amerika hingga masa kemerdekaan Filipina, umat Muslim di wilayah ini merasa dipinggirkan secara politik, ekonomi, dan sosial oleh pemerintah pusat yang mayoritas Kristen. Akumulasi kekecewaan ini memicu munculnya gerakan MNLF pada tahun 1972, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsamoro dan melawan dominasi pemerintah Filipina yang dianggap menindas. Gerakan ini juga dipengaruhi oleh identitas etnis, agama, dan sejarah panjang perlawanan masyarakat Moro terhadap kekuatan kolonial dan negara Filipina.
2. Moro National Liberation Front (MNLF) adalah gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1972 oleh Nur Misuari dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Moro di Filipina Selatan.

MNLF telah mengalami berbagai tahap perkembangan, mulai dari perjuangan bersenjata, perpecahan internal, hingga keterlibatan dalam proses perdamaian. Perkembangan MNLF mencerminkan dinamika perjuangan panjang masyarakat Moro di Filipina Selatan. Meskipun awalnya menjadi pelopor dalam perjuangan kemerdekaan, MNLF mengalami penurunan pengaruh setelah munculnya kelompok lain seperti MILF. Namun, MNLF tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan proses perdamaian di Filipina Selatan, dengan harapan bahwa integrasi dan otonomi yang lebih besar dapat membawa perdamaian yang berkelanjutan bagi wilayah tersebut.

3. Negara-negara Islam, bersama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI), pemerintah Filipina, dan perwakilan dari faksi-faksi politik yang mewakili kedua belah pihak yang bertikai, melakukan diskusi dan kemudian mencapai kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak agar Filipina Selatan menjadi damai. Moro National Liberation Front (MNLF) dalam memperjuangkan minoritas Muslim Moro menuju perdamaian adalah bahwa gerakan ini berperan penting dalam membuka jalan menuju pengakuan hak-hak masyarakat Moro. MNLF berjuang untuk memperoleh otonomi dan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi bagi Muslim Moro yang selama ini terpinggirkan. Melalui perjuangan bersenjata, negosiasi, dan perjanjian perdamaian, MNLF berhasil menarik perhatian internasional dan pemerintah Filipina terhadap ketidakadilan yang dialami minoritas Muslim Moro.

Puncak dari perjuangan MNLF adalah tercapainya Perjanjian Perdamaian Tripoli (1976) dan Perjanjian Perdamaian 1996, yang memberikan dasar bagi pembentukan wilayah otonomi di Mindanao.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang disebutkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi individu yang tertarik dengan Sejarah Gerakan Separatisme di Filipina Selatan, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi.
2. Kepada para mahasiswa di Jurusan Sejarah Peradaban Islam didorong untuk mengeksplorasi topik-topik sejarah yang belum banyak diteliti oleh para sejarawan sebelumnya. Praktik ini dapat membantu melestarikan sejarah yang tidak terdokumentasi dan mencegah hilangnya sejarah tersebut. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi referensi yang berharga bagi para peneliti selanjutnya.
3. Peneliti menyadari bahwa tidak akan terlepas dari kesempurnaan dan keterbatasan yang masih kurang. Sehingga membutuhkan koreksi dari para pembaca. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk tidak berhenti pada penelitian ini saja, untuk dapat mengembangkan studi kasus. Dalam segi kepenulisan diharapkan dapat dikembangkan juga dan bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, T & Siddique, S. (1988). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES).
- Abdullah, T. dkk. (2002). *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Itchiar Baru Van Hoeve, t.t).
- Abdurahman, D. (2019). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Alchaidar, (1999). *Wacana Ideologi Negara Islam Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*. Jakarta: Darul Falah.
- Alim, G. M. (1995). *The Bangsamoro Struggle for Self-Determination. European Solidarity Conference on the Philippines Philippine Solidarity 2000: In Search of New Perspectives*. Hoisdorf, Germany.
- Anwar, R. dkk. (2014). *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Apipudin. (2008). *Islam Asia Tenggara*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Eposito, J. L, (2000) *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan).
- George, T. J. S. (1980). *Revolt in Mindanao*, Oxford University Press Kuala Lumpur, Malaysia.
- Gowing, P. (1979). *Muslim Filipinos: Heritage and Horison*. Quezon City: New Day Pusblishers.
- Gross, M. L. (2007). *A Muslim Archipelago: Islam And Politics In Southeast Asia*, (Wahsington DC: Centre For Strategic Intelegence Research NDIC Press).
- Abdul Haq, N. (2000). *Independent Bangsa Moro State*, book 1, Agency for Youth Affairs of MILF.
- Helmiati, (2014). *Sejarah Islam Asia Tenggara*: Pekanbaru
- Hidayat, A. A. dkk., (2013) *Studi Islam di Asia Tenggara*, Pustaka Setia: Bandung.
- Ibrahim, Q. A. & Saleh, M. A., (2014). *Buku Pintar Sejarah Islam Jejak Langkah Peradaban Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Zaman).

- Karim, M. A., (2014). *Sejarah Pemikiran dan Peraban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara).
- Kuntowijoyo, (1991). *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Penerbit Mizan).
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lim, J. & Vani, S. (ed). (1984). *Armed Separatism in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Majul, C. A, (1989). *Dinamika Islam Filipina*, (Jakarta: LP3ES).
- McKenna, T. (1998). *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*. Berkeley: University of California Press.
- Miftahudin. (2020). *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mubarok, Z. (1993). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Muzani, S. (1993). *Pembangunan Dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES).
- Pangarungan, S. (1985). *Muslim Filipino Struggle for Identity: Challenge and Response* (Quezon City: International Studies Institute of the Philippines).
- Perwita, A.A. (2007). *Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Malaysia : NIAS Press.
- Saifullah. (2010). *Sejarah dan Kebudayaan Islam Di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Salamat, H. (2001). *The Bangsa Moro People's Struggle Against Oppression and Colonialisation*, Agency for Youth Affairs-MILF, Camp Abu Bakar Ass Shiduque, Mindanaw.
- Sauedy, A. (2012). *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jajan Damai Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*, The Wahid Institute: Jakarta.
- Sibhudi, R. (ed). (2000). *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara (Kasus Moro, Pattani dan Rohingya)*. Jakarta Pulitbang Politik dan Kewilayahan LIPI.
- Steinberg, J. D. (1982). *The Philippines: A Singular and Plural Place* (Colorado: Westview Press).
- Stern, T. (2012) *"Nur Misuari An Authorized Biography"* Anvil Publishing, Inc.

- Syeinberg, R. (1987). *Kembali ke Filipina*. Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Sudibyjo. (1978). *Dokumentasi ASEAN Dalam Berita, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. In Malang: Intrans Publishing.
- Surwandono, (2013). *Manajemen Konflik Separatisme Dinamika Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tadem, E. (1980). *Mindanao Report: A Preliminary Study of the Economic Origin of Social Unrest*. Davao City: AFRIM Resource Center.
- Thahhan, M. M., (2000). *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, (Solo: Era Intermedia).
- Vitug, M. D. & Gloria, G. (2000). *Under the Crescent Moon: Rebellion in Mindanao* (Quezon City: Ateneo Center for Social Policy and Public Affairs).
- Wayan Partiana. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Yegar, M. (2002). *Between Integration and Secession: "The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar"* Published in The United States of America.
- Yusuf, C. F. dkk., (2017). *Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand*, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, University of California.
- Zain, F. M. (2019). *Nusantara Selepas Merdeka: Cabaran Agamawan dalam Membela & Membangun Tanah Air*. Malaysia.

Jurnal Ilmiah

- Ahmad, A. (1982). "400 Year War-Moro Struggle in the Philippines." *Southeast Asia Chronicle*.82, 21-27.
- Budiwanti, E. (2003). *Multikulturalisme, Separatisme dan pembentukan negara bangsa di Filipina*. Pusat Penelitian Sumberdaya Regional-LIPI, ISSN: 1412-582X. Jakarta.
- Hasanah, E.P. (2017). "Studi Eksplanatif Penyebab Gerakan Separatis Minoritas Muslim Moro di Filipina" *Journal of Integrative International Relations*, ISN 2477-3557. Surabaya.
- Hidayat, D. (2012). *Gerajan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi*. jurnal Sosiologi Masyarakat. Vol. 7. No. 2.

- Jamil, A. (2013). *Islam dan Kebangsaan: Teori dan Praktik Gerakan Sosial Islam di Indonesia (Studi atas Front Umat Islam Kota Bandung)*. Dalam jurnal Multikultur dan Multireligius Vol. 12. No.1.
- Kartini, I. (2011). *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali*, Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, edisi XXXVII/NO.2/2011.
- Noble, L. G. (1976). *The Moro National Liberation Front in the Philippines*. Pacific Affairs, 49(3), 405. <https://doi.org/10.2307/2755496>
- Pratama, F. S. (2022). *Nur Misuari Pejuang Muslim Filipina: Pasang Surut Karir Politik dan Pejuang Muslim Moro (1939-2018)*. Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban ISSN: 0216-5945.
- Quimpo, N. G. (2000). "Back to War in Mindanao The Weakness of a Power-based Approach in Conflict Resolution" Philippine Political Science Journal No 44. Vol 21.
- Sobandi, K. R. (2011). "Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas" Jurnal Kajian Wilayah Vol. 2, No. 1, 2011, Hal. 35-55.
- Wiharyanto, A. K. (2014). *Perkembangan Masalah Moro 1975-1994*. Historia Vitae: Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah ISSN: 0215-8809.

Skripsi

- Budiarti, N. (2009). *Muslim Moro Tragedi Jabidah di Corregidor 1968*, (Depok: UI, 2009).
- Firmanzah, F. (2017). 'Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)'. Intelektualita, 6(1): 29-50.
- Pramoto, S. H. (1990). *Political Implications of the Problem in Southern Philippines* (Manila: University of Santo Tomas Press).
- Rosnawati, W. (2008). *Perjuangan Moro National Liberation Front (MNLF) dalam menuntut Kemerdekaan Mindanao dari Filipina (1969 -1996)* (Bandung: UPI).
- Luga, A. R. (1981). *Muslim Insurgency in Mindanao, Philippines*. Philippine Military Academy, Baguio City.

Tesis

Supyan, M.D. (2016). *“Gerakan Darul Islam (DI) S.M. Kartosuwirjo Di Jawa Barat dalam Mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) (1945-1962 M)”* UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Domingo, R.G (1995). *“The Muslim Secessionist Movement in the Philippines: issues and prospects”* California: Naval Postgraduate School.

Dumia, M. A. (1991). *“The Moro National Liberation Front (MNLF) and the Organization of the Islamic Conference: Its Implications to National Security”* (Master’s Thesis, National Defense College of the Philippines).

Harber, J. D. (1998). *“Conflict and Compromise in the Philippines: The Case of Moro Identity”* (Master’s Thesis, Naval Postgraduate School).

Disertasi

Mangorsi, A. T. (2021). *Revisiting The Bangsamoro Separatism In Southern Philippines Through The Lens Of History*. Selinus University of Sciences and Literature. Paranaque City, Metro Manila, Philippines.

Thomas, R. B. (1971). *“Muslim But Filipino”* Department of History, University of Philadelphia. Amerika Serikat.

Website

Adryamarthanino, V. (2021). Front Pembebasan Nasional Moro, Organisasi Muslim di Filipina. Kompas.Com, All.

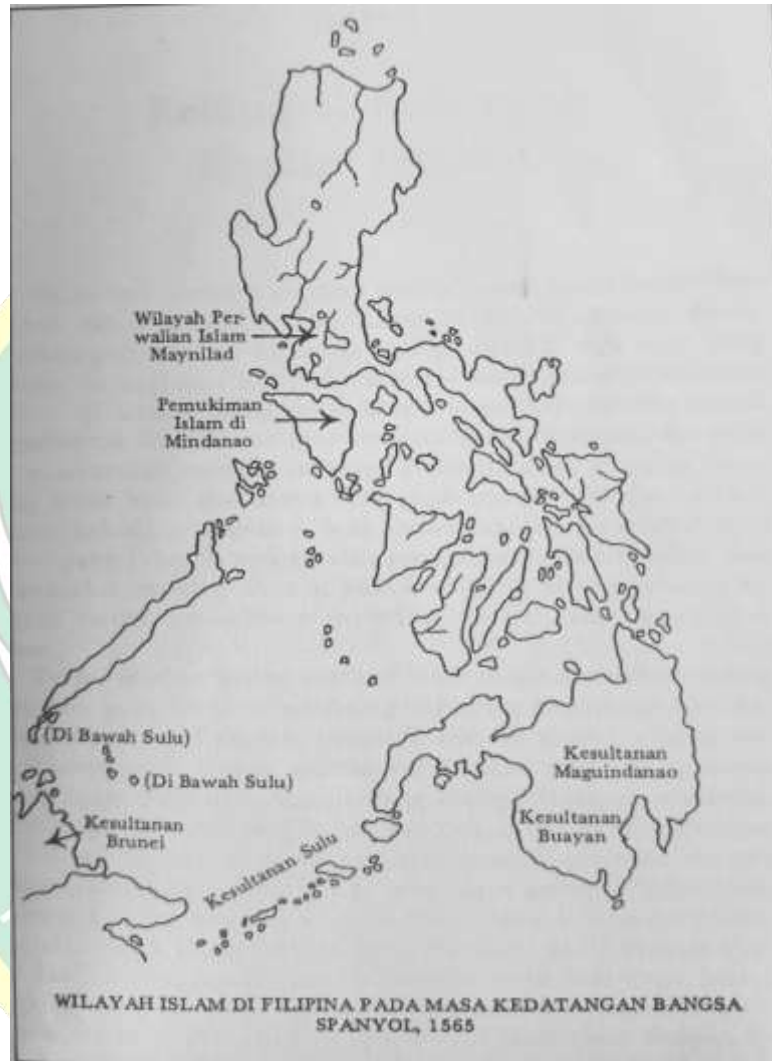
Dbpedia. “Moro National Liberation Front” <http://mnlfnct.com/> di akses pada tanggal 16 Juni 2023.

Philippines. (2013). Moro National Liberation Front (MNLF) di akses pada 19 Juni 2023, dari <https://www.loc.gov/item/lcwaN0008603/>

Ensiklopedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina> di akses pada 16 November 2023

.Lampiran 1

Daftar Gambar



Gambar 1. Peta Filipina

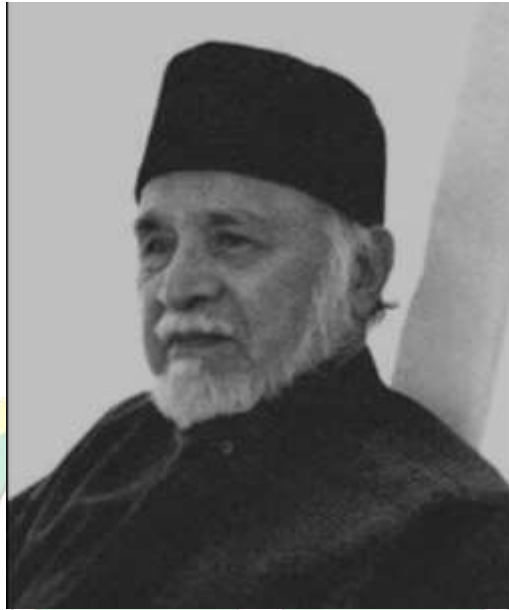
Sumber: Majul, 1989. *Dinamika Islam Filipina*. Jakarta: LP3ES.



Gambar 2. Prof. Dr. Nurullaji Pining Misuari
Sumber: <https://en.minanews.net/?s=Nur+Misuari+&submit=Search>

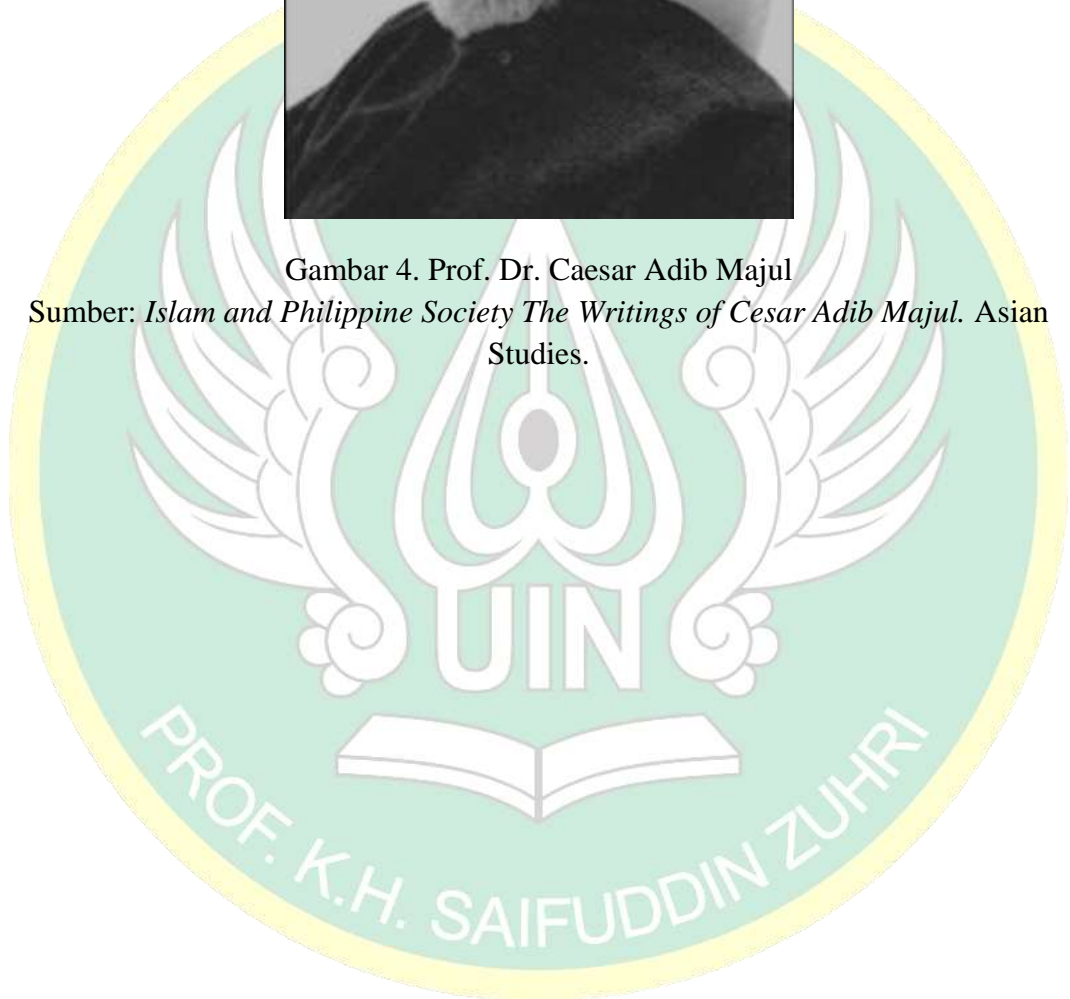


Gambar 3. Bendera *Moro National Liberation Front* (MNLF)
Sumber: <https://images.app.goo.gl/g5zNRYjttGrVhYkf8>



Gambar 4. Prof. Dr. Caesar Adib Majul

Sumber: *Islam and Philippine Society The Writings of Cesar Adib Majul*. Asian Studies.



Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 46A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B.736/Un.19/FUAH/PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Mahmud Maulana
NIM : 2017503010
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme Nur Misuari di Filipina Selatan (1972-1996 M).

Pada Hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Judul perlu diperjelas lagi terkait MNLF atau Nur Misuari.
2. Latar belakang perlu diperjelas lagi kapan terjadinya gerakan tersebut.
- 3.
- 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Pembimbing,

Fitri Sari Setyorini, M.Hum.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 24 Juni 2024

Penguji,

Dr.H.Nasrudin, M.Ag.

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-792/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/7/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mahmud Maulana
NIM : 2017503010
Fak/Prodi : FUAH/ Sejarah Peradaban Islam
Semester : 8
Tahun Masuk : 2020

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Sejarah Peradaban Islam pada Tanggal 8 Juli 2024. **Lulus dengan Nilai: 77,5 (B+)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 9 Juli 2024

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
NIP. 197402281999031005

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsu.ac.id>, Email: lib@uinsu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-3163/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MAHMUD MAULANA
NIM : 2017503010
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FUAH / SPI

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 4 Juli 2024



Kepala,

Indah Wijaya Antasari

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANGKO/ KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahmud Maulana
 NIM : 2017503010
 Jurusan/Prodi : Studi Al-Qur'an dan Sejarah/ Sejarah Peradaban Islam
 Pembimbing : Fitri Sari Setyorini, M. Hum.
 Judul : Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme Nur Misuari di Filipina Selatan (1972-1996 M).

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	22 Juni 2023	Acc Seminar proposal	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
2	31 Januari 2024	Melanjutkan Revisi Seminar proposal	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
3	10 februari 2024	Lampiran, Sistematika, Landasan teori	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
4	10 februari 2024	Peta wilayah, Bagan organisasi	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
5	7 Maret 2024	Abstrak, Daftar pustaka, Halaman	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
6	7 Maret 2024	Kesimpulan, saran, Kata miring	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
7	13 Mei 2024	Cek Turnitin fakultas	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>
8	28 Mei 2024	Acc Munasosyah	<i>FR</i>	<i>MD/0</i>

**) Dilisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan*

Dibuat di : Purwokerto
 Tanggal : 28 Mei 2024
 Dosen Pembimbing

Fitri Sari Setyorini, M. Hum.

 Fitri Sari Setyorini, M. Hum.

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaiu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **B-162/Un.19/Kalab.FUAH/PP.08.2/05/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sidik Fauji, M. Hum.
NIP : 199201242018011002
Jabatan : Kepala Laboratorium FUAH

Menerangkan bahwa, mahasiswa kami :

Nama : MAHMUD MAULANA
NIM : 2017503010
Prodi : SPI
Judul Skripsi : SEJARAH PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME
NUR MISUARI DI FILIPINA SELATAN (1972-1996 M)

Dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut melakukan cek plagiasi terhadap skripsi pada tanggal **27 Mei 2024** melalui *turnitin* dengan hasil kesamaan keseturuhan ialah **13 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 27 Mei 2024

Kalab FUAH,


Sidik Fauji, M. Hum.
NIP 199201242018011002

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mahmud Maulana
NIM : 2017503010
Jurusan/Prodi : Studi Al-Qur'an dan Sejarah/ Sejarah Peradaban Islam
Angkatan Tahun : 2020
Judul Proposal Skripsi : Sejarah Perkembangan Gerakan Separatisme Nur Misuari di
Filipina Selatan (1972-1996 M)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Mengetahui,
Koordinator Program Studi SPI


Nurrohmah, Lc. M.Hum.,
NIP. 19870902 201903 1 001

Pembimbing

Fitri Sari Setyorini, M.Hum.,
NIP. 19890703 202321 2 036

Lampiran 8 - (sertifikat BTA-PPI)



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0261-635624, 628260 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/20700/10/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	MAHMUD MAULANA
NIM	:	2017503010

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	90
# Tartil	:	80
# Imla'	:	80
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 17 Okt 2022



ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

(sertifikat pengembangan bahasa Arab)

	MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia www.uinraniry.ac.id www.bahasa.uinraniry.ac.id +62 (281) 635624
CERTIFICATE الشهادة	
No.B-833 /Un.19/K.Bhs/PP.0096/2023	
This is to certify that	
Name	MAHMUD MAULANA
Place and Date of Birth	Cilacap, 20 Agustus 2001
Has taken	IQLA
with Computer Based Test,	
organized by Language Development Unit on	17 Mei 2023
with obtained result as follows	
Listening Comprehension: 48	Structure and Written Expression: 45
Reading Comprehension: 49	Obtained Score : 474
نتم التمتع بالامتحان	
الاسم	
مبني الى	
محل وتاريخ الميلاد	
وقد عاركت الامتحان	
على اساس الكمبيوتر	
التي قامت بها الوحدة لتتبع اللغة في التاريخ التالي	
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي	
نتم التمتع بالامتحان	
الاجمعي الكلي :	
تم اجراء الامتحان بجامعة الاستاذة كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بپوروكرتو.	
The test was held in UIN Professor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.	
Purwokerto, 17 Mei 2023	
The Head of Language Development Unit,	
رئيسة الوحدة لتتبع اللغة	
Dr. Ade Ruswate, M. Pd.	
NIP. 19860704 201503 2 004	
	
PTIRIA English Proficiency Test of UIN PROF. KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI	UIN Ar-Raniry at-Qadiriyyah and at-Lughawiyah at-Kelompok

(sertifikat pengembangan bahasa Inggris)

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KHAI HAJI SAJJIDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatru.ac.id | www.bahasa.uinsatru.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاساتذة كخي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوردو كرتو
الوحدة لتنمية اللغة

شهادة
CERTIFICATE

No.B-6294/U.N.19/K.Bha/PP.0091/2/2023

MAHMUD MAULANA
Cilecap, 20 Agustus 2001
EPTUS
15 Desember 2023

اسم
محمّد إلى
محل وتاريخ الميلاد
وقد عاينك/ات الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ التالي:
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:
فهم القروء
Reading Comprehension: 43

فهم السموع
Listening Comprehension: 44

فهم العبارات والتراكيب
Structure and Written Expression: 48

فهم القروء
Obtained Score : 450

The test was held in UIN Professor Khai Hajj Sajjudin Zuhri Purwokerto.
Purwokerto, 15 Desember 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Mulfihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720823 200003 2 001



SERTIFIKAT



No. B- /Un.19./Kalab.FUAH/PP.08.2/2/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 21 Februari 2023 Menerangkan Bahwa :

Mahmud Maulana

NIM : 2017503010

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

• • • • • UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2022/2023 yang bertempat di :

Museum Wayang, Banyumas

9 Januari - 7 Februari 2023

dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

• • • • •

• • • • •

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

Purwokerto, 24 Februari 2023

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309211990022001

Kepala Laboratorium

Sydiq Fauji, M.Hum.
NIP. 199201242018011002

(sertifikat PPL)

(sertifikat KKN)

The certificate is titled "Sertifikat" and is issued by the Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. It certifies that the student MAHMUD MAULANA (NIM: 2017503010) has successfully completed the KKN (Kuliah Kerja Nyata) program for the 52nd cohort in 2024, achieving a grade of 91 (A). The certificate includes a QR code for validation and a small portrait of the student.

Sertifikat
Nomor Sertifikat : 0515/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **MAHMUD MAULANA**
NIM : **2017503010**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai 91 (A).



Certificate Validation

Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mahmud Maulana
2. NIM : 2017503010
3. Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 20 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Bantarpanjang, Cimanggu, Cilacap
5. Nama Ayah : Tatang Suryadi
6. Nama Ibu : Roroh Sakiroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal, Tahun Lulus/ Tahun Masuk
 - a. SDN Karang Sari 03 Cimanggu Cilacap, 2013
 - b. MTs Miftahul Huda Karangpucung Cilacap, 2016
 - c. SMK Miftahul Ihsan Al-Banjary Kota Banjar, 2020
 - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Hidayatussolihin Karangpucung Cilacap
 - b. Pondok Pesantren Miftahul Ihsan Kota Banjar
 - c. Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Devisi Advokom HMPS SPI Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (2021/2022)
2. Devisi Kominfo PMII Rayon Fuah Komisariat Purwokerto

(2022/2023)

3. Devisi Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Adab dan Humaniora (2022/2023)
4. Menteri Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Adab dan Humaniora (2023/2024)

Purwokerto, 07 Juli 2024


Mahmud Maulana

NIM. 2027503010

